

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

---

**MEMORANDUM**

Nomor 296/SJ.5/TU.210/II/2025

Yth. : Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri  
Hal : Capaian Kinerja Biro Humas dan KLN Tahun 2024  
Tanggal : 21 Januari 2025

---

Sehubungan dengan pelaksanaan kinerja pada periode Triwulan IV, bersama ini dengan hormat kami melaporkan capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebesar 103,59, sebagaimana tabel terlampir.

Demikian kami melaporkan, atas perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Ari Prabowo**

Tembusan:  
Kepala Biro Perencanaan.

Lampiran Memorandum  
 Nomor : 296/SJ.5/TU.210/I/2025  
 Tanggal : 21 Januari 2025

**Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama  
 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri  
 Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi	Capaian
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	99,91	103,11%
	2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	94,36	101,14%
	3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	97,73	103,97%
	4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	96,06%	107,93%
	5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	90,93	103,33%
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
	7 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	100%	107,53%
	8 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	88,11%	100,13%
	9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%
3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	85,80	102,14%
	11 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	85,58	100,68%
	12 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%	100%
	13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	100%	106,38%
	14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	95%	100%
	15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	99,52%	104,76%
	16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	100%	100%
	17 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	82,29	109,72%

Capaian indikator kinerja, serta kinerja anggaran sebagaimana tautan <https://bit.ly/lkjbhkn2024>



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA

*Tahun 2024*

BIRO HUBUNGAN  
MASYARAKAT  
DAN KERJA SAMA  
LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Pada tahun anggaran 2024, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

Dalam pengejawantahan kinerja tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 17 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2024 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini kami sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Januari 2025

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan  
Kerja Sama Luar Negeri



Ari Prabowo



# ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
EXECUTIVE SUMMARY .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tujuan.....	1
c. Tugas dan Fungsi .....	1
d. Sumber Daya Manusia .....	3
e. Potensi.....	3
f. Permasalahan dan Tantangan.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024.....	5
b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 .....	5
c. Pemantauan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2024.....	7
d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024, Rencana Kerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
a. Capaian (dan Realisasi) Kinerja Biro HKLN Tahun 2024.....	10
IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP.....	14
IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP.....	18
IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP .....	22
IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan .....	24
IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	26
IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti .....	29
IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	33
IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional .....	36
IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	41
IK 10 Persentase penyelesaian temuan BPK di Lingkup Biro HKLN .....	44
IK 11 Nilai PM SAKIP Biro HKLN .....	46

IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN.....	49
IK 13 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro HKLN.....	51
IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN .....	53
IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri .....	55
IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	56
IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN.....	58
b. Kinerja Anggaran Biro HKLN Tahun 2024 .....	60
c. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai umpan balik Perencanaan 2025 .....	61
d. Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP tahun 2024.....	61
BAB IV PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA .....	62
BAB V PENUTUP .....	63
Kesimpulan.....	63
Saran .....	64
LAMPIRAN .....	65
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 ditanda tangan tanggal 15 Januari 2024.....	65
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 ditanda tangan tanggal 23 Oktober 2024 .....	68
Foto-foto Penghargaan yang diterima Biro HKLN pada Tahun 2024 .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN tahun 2024	3
Tabel 2 Daftar Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 versi awal dan versi revisi/perubahan	6
Tabel 3 Daftar Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja Biro HKLN tahun 2024	7
Tabel 4 Renstra Setjen 2020-2024, Perkin Biro HKLN 2024 dan Renker 2024	9
Tabel 5 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Biro HKLN tahun 2024	10
Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	14
Tabel 7 Target dan Realisasi IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tahun 2017 s.d. Tahun 2023	14
Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	18
Tabel 9 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tahun 2017 s.d. 2023	18
Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024	22
Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2017 s.d. 2023	22
Tabel 12 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024	24
Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2017 s.d. 2023	24
Tabel 14 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	26
Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 s.d. 2023	26
Tabel 16 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2024	29
Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2017 s.d. 2023	29
Tabel 18 Persentase Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan III 2024	33
Tabel 19 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan Tahun 2017 s.d. 2023	33
Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	36
Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Tahun 2017 s.d. 2023	36
Tabel 22 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	41
Tabel 23 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2017 s.d. 2023	41
Tabel 24 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN 2024	44
Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017 s.d. 2023	44
Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tahun 2024	46
Tabel 27 Target dan Realisasi IK Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023	46
Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Tahun 2024	49

Tabel 29 Target dan Realisasi IK Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023	49
Tabel 30 Realisasi dan Capaian IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro HKLN Tahun 2024	51
Tabel 31 Target dan Realisasi IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023	51
Tabel 32 Realisasi dan Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN Tahun 2024	53
Tabel 33 Target dan Realisasi IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023	53
Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tahun 2024	55
Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Tahun 2017 s.d. 2023	55
Tabel 36 Realisasi dan Capaian IK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024	56
Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017 s.d. 2023	56
Tabel 38 Realisasi dan Capaian IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN Tahun 2024	58
Tabel 39 Target dan Realisasi IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023	58
Tabel 40 Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP tahun 2024	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)	2
Gambar 2 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku Tahun 2024 untuk akun Biro HKLN	11
Gambar 3 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku untuk output kinerja Biro HKLN Tahun 2024	12
Gambar 4 Piagam Penghargaan untuk Biro HKLN atas keberhasilan memenuhi target IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	59

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam Peraturan tersebut diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersifat strategis karena secara timbal balik berperan sebagai komunikator atau penjembatan secara horizontal yaitu antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *counterpart* dari negara asing mitra Indonesia dan dengan organisasi kerja sama regional dan internasional. Selain itu Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berperan secara vertikal yaitu mediator arus informasi dari Menteri kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kepada publik umum serta menjadi *hub* informasi masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri merelasikan kebijakan Menteri dan pimpinan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan publik eksternal di dalam dan di luar negeri (serta kepada publik internal Kementerian) juga memiliki nilai strategis yang tidak kalah penting.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dituangkan ke dalam 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Adapun ke-17 IK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP;
2. Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP;
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP;
4. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
5. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti;
7. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
8. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional;
9. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN;
11. Nilai PM SAKIP Biro HKLN;
12. Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN;
13. Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN;
14. Persentase Rekomendasi Hasil Ppengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN;
15. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;

16. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri; dan
17. Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN.

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)), aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2024 adalah 103,59. Mengacu kepada Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan Nilai Kinerja Organisasi tersebut maka Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri memperoleh predikat baik.

## EXECUTIVE SUMMARY

The Bureau of Public Relations and International Cooperation of the Secretariat General of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries functions as a coordinating unit to facilitate efforts of formulation, analysis and development of public communication and international cooperation in the sector of fisheries and maritime. This is in line with the Decree of Minister of Marine Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia No. 5 of 2024 concerning Organization and Work System within Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The goal of the Decree is to create the Ministry of Marine Affairs and Fisheries a world class organization which is running excellent bureaucracy .

The strategic of the Bureau in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries is derived from its position as 'the bridge' which mediates the internal of the Ministry with foreign parties which comprise government and organization from foreign country, regional and multilateral cooperation organizations and from the job description of the Bureau as the communication and public relations agent of the Ministry. The Bureau is also responsible for managing all media owned by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries which is communicating all policy formulated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and aspiring public voices.

Duty and responsibility of the Bureau is manifested into 3 (three) goals and furthermore are delivered into 17 (seventeen) Key Performance Indicators (KPI) i.e.:

1. Score of input dimension of management of information and public communication of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
2. Score of process dimension of management of information and public communication of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
3. Score of Public Information Openness of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
4. Percentage score of effectiveness of institution relations service in the sector of marine and fisheries;
5. Score of satisfaction for the service of the library of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
6. Percentage of implementation bilateral cooperation documents;
7. Percentage score of the satisfaction of administration service for overseas official trip;
8. Percentage of acceptance of Indonesian position/recommendation/initiative position in the sector of marine and fisheries in international for a;
9. Percentage of Indonesian leadership in international and regional for a or marine and fisheries subject;
10. Percentage of settlement to BPK finding by the Bureau of Public Relations and International Cooperation;
11. Score of self-evaluation of SAKIP of Bureau of Public Relations and International Cooperation;
12. Index of Professionality of Bureau of Public Relations and International Cooperation;
13. Percentage of application of Standardized Knowledge Management in the Bureau of Public Relations and International Cooperation;
14. Percentage of utilization of supervision recommendation for performance improvement of the Bureau of Public Relations and International Cooperation;
15. Percentage of annual budget spending of the Bureau of Public Relations and International Cooperation;
16. Percentage of finalisation of legislation of the Bureau of Public Relations and International Cooperation; and

17. Score of soon-to-be Corruption Free Zone of the Bureau of Public Relations and International Cooperation.

Measured by [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), the KPI application used in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the score organization performance for the Bureau is 103,59. According to Article 21 of the Decree of Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 35 of 2023 concerning Management of Organization Performance in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Bureau, the score is categorized as satisfying.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama tahun 2024 (tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024). Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2024 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2024 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit setiap triwulan kepada Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial dan staf pengelola kinerja di Biro HKLN. Selanjutnya, staf pengelola kinerja atas arahan dan bimbingan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial melaporkan pencapaian kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem elektronik yaitu aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh/dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024.

### b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah:

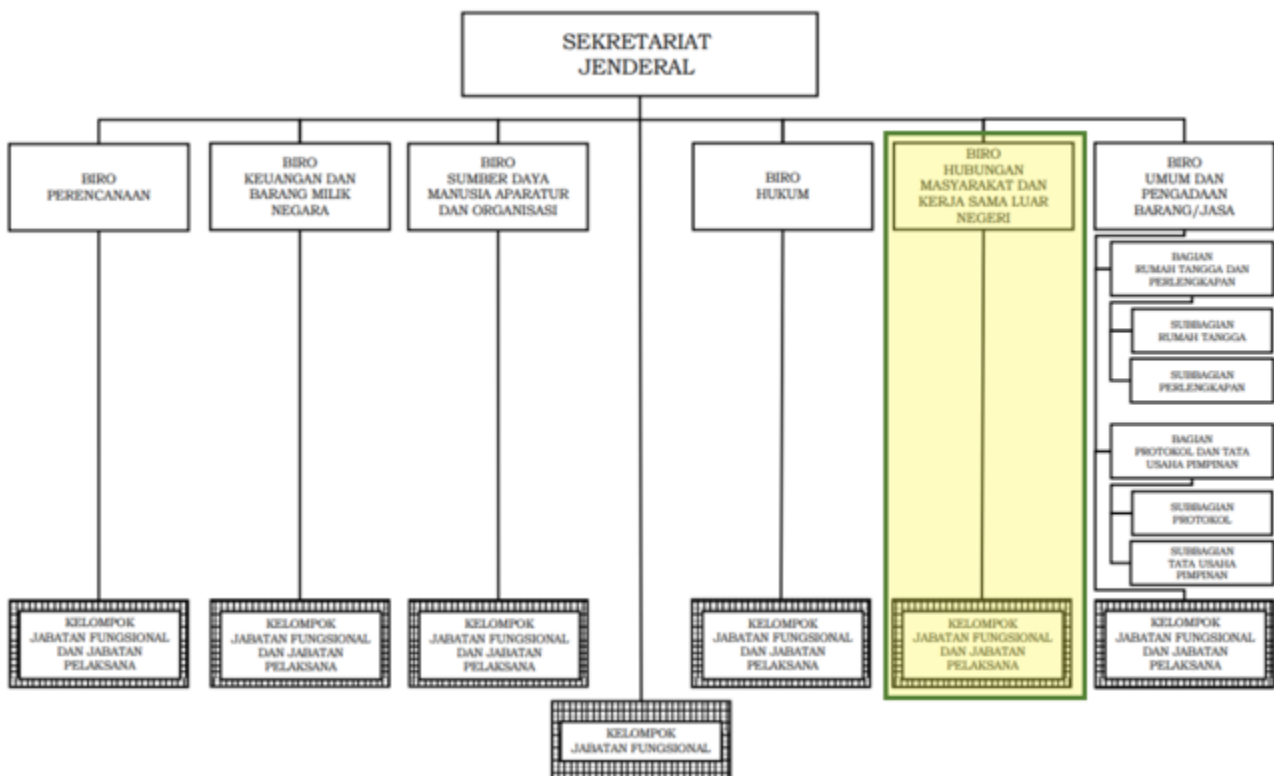
- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

### c. Tugas dan Fungsi

Terhitung sejak tanggal 26 Februari 2024, struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro HKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Biro HKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program

hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- b. koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- c. koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan;
- d. koordinasi penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- e. koordinasi pelaksanaan layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- f. pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri melainkan mengadopsi tugas, fungsi, visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan visi dari Sekretariat Jenderal KKP yaitu:

“Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, rumusan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

#### d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada tahun 2024 berjumlah 84 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Jabatan/Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Pemberitaan dan Opini Publik	30
3	Layanan Informasi Publik	9
4	Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	10
5	Kerja Sama Bilateral	8
6	Kerja Sama Multilateral	8
7	Dukungan Manajerial	16
8	Diperbantukan/dipekerjakan	2
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN tahun 2024

#### e. Potensi

Potensi yang dimiliki Biro HKLN dalam melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi Biro HKLN sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait adalah:

- a. Komitmen kuat dari Kepala Biro HKLN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Sumber daya manusia baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berintegritas, handal, tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro HKLN;
- c. Lebih dari 70% atau mayoritas sumber daya manusia Biro HKLN telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Diantaranya berasal dari perguruan tinggi kenamaan di Indonesia seperti Sekolah Tinggi Perikanan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Beberapa sumber daya manusia Biro HKLN juga telah mengenyam pendidikan pascasarjana di perguruan tinggi kenamaan tingkat dunia di negara Inggris, Jepang, Australia, dan Korea Selatan;
- d. Biro HKLN memiliki *network* nasional dan internasional yang luas termasuk dengan organisasi-organisasi multilateral/kerja internasional seperti PBB, WTO, IMF, Bank Dunia, ILO, IMO, ASEAN, Uni Eropa, dan CTI-CFF yang sangat bermanfaat diantaranya dalam mendukung ekspansi pasar dan negosiasi dagang komoditas kelautan dan perikanan Indonesia;
- e. Sumber daya manusia Biro HKLN yang bergerak dalam bidang komunikasi publik dan kehumasan adalah asset unggul, berharga dan berpengalaman yang dimiliki KKP karena

- telah menunjukkan prestasi memenangkan peringkat/*score* tertinggi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
- f. sarana dan prasarana aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai;

#### f. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) adalah permasalahan utama dan/atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu Biro HKLN juga merumuskan isu strategis atau permasalahan dan tantangan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN. Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi sehingga menjadi fokus perhatian Biro HKLN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy tidak selalu mudah terutama karena faktor eksternal yang sangat dinamis;
2. Citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Pencapaian program prioritas KKP di tahun 2024 dan kontribusi Biro HKLN; dan
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dan mental serta reformasi birokrasi KKP.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditanda tangan oleh Sekretaris Jenderal KKP tanggal 1 November 2024, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Renstra Setjen KKP 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Sekretariat Jenderal dan dipergunakan sebagai acuan setiap unit organisasi eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk periode 5 (lima) tahun.

### b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Pada tahun 2024, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Biro HKLN melakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 15 Januari 2024 dan pada 23 Oktober 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja 2024 yang kedua merupakan revisi terhadap Perjanjian Kinerja 2024 pertama. Alasan utama dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja adalah karena adanya revisi anggaran Biro HKLN. Pada awal 2024 sebesar anggaran Biro HKLN Rp. 37.486.550.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah beberapa waktu berubah menjadi Rp. 36.528.911.000 (tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Adapun kedua dokumen Perjanjian Kinerja Biro HKLN sepanjang 2024 dapat dilihat dalam Lampiran laporan ini.

Substansi Perjanjian Kinerja yaitu butir-butir Indikator Kinerja dan targetnya versi Perjanjian Kinerja tanggal 15 Januari 2024 dan versi revisi/perubahan pada tanggal 23 Oktober 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tidak terdapat perubahan terutama pada target Indikator Kinerja kecuali untuk IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja yang semula 100% berubah menjadi 95%. Perubahan lainnya bersifat minor dan tidak substantif seperti nomenklatur Indikator Kinerja diantaranya dengan menyingkat Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menjadi Biro HKLN dan perubahan urutan butir Indikator Kinerja.



VERSI 15 JANUARI 2024			VERSI 23 OKTOBER 2024		
No	Indikator Kinerja	Target	No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9
2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94
4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%
5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88
6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%
7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	7	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%
8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	8	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%
9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%
10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	10	Nilai PM SAKIP Biro HKLN	84
11	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	11	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	85
12	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	100%
13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	13	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN	94%
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	95%
15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%
16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%
17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	75	17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN	75

Tabel 2 Daftar Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 versi awal dan versi revisi/perubahan

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diraih oleh Biro HKLN sebagai hasil pelaksanaan seluruh Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab dan digenapi Biro HKLN pada akhir tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, rumusan sasaran Biro HKLN pada tahun 2024 adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional;
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Dalam rangka mewujudkan dan memungkikan terukurnya sasaran-sasaran di atas maka seluruh dibentuklah Indikator Kinerja yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif supaya memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja. Butir-butir Indikator Kinerja juga merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Butir-butir Indikator Kinerja Biro HKLN tahun 2024 dan besar masing-masing targetnya yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja terakhir tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%
		7	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%
		8	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	100%
		11	Nilai PM SAKIP Biro HKLN	84
		12	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	85
		13	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN	94%
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	95%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%
17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN	75		

Tabel 3 Daftar Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja Biro HKLN tahun 2024

### c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2024

Beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh dari informasi kinerja Biro HKLN Tahun 2024 kira-kira adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya informasi untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN;
- b. Membantu merumuskan penganggaran yang berbasis pada kinerja;
- c. memudahkan Biro HKLN untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung;
- d. Mengubah paradigma kerja menjadi kinerja;
- e. Sebagai dasar pemberian rewards;

- f. Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Biro HKLN untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia;

Manfaat tambahan dari informasi kinerja mencakup paradigma bahwa program dan kegiatan yang memiliki output dan outcome yang jelas yang dihasilkan sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Implikasinya adalah seluruh jajaran Biro HKLN terpacu untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Selain itu, Biro HKLN semakin mampu memberikan pelayanan kepada publik internal KKP yang baik

d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024, Rencana Kerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024

Renstra Setjen 2020-2024		Perkin Biro HKLN 2024		Rencana Kerja Biro HKLN 2024	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Target
Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	89,5
Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	85,5
Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	92
Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%
Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88
Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%
Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	85%
Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	95%
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	95%
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	100%	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	100%	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	100%
Nilai PM SAKIP Biro HKLN	84	Nilai PM SAKIP Biro HKLN	84		
Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	85	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	85	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro HKLN	83
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN	94%	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN	94%	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN	94%
Persentase Rekomendasi Hasil Ppengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	95%	Persentase Rekomendasi Hasil Ppengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	95%	Persentase Rekomendasi Hasil Ppengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	100%
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%
Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%		
Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN	75	Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN	75		

Tabel 4 Renstra Setjen 2020-2024, Perkin Biro HKLN 2024 dan Renker 2024

Matrik 4 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 memuat butir-butir Indikator Kinerja untuk menjadi tanggung jawab Biro HKLN di Tahun Anggaran 2024. Adapun ke-17 butir Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 di atas. Di sebelah kanan kolom Renstra Setjen 2020-2024 pada tabel yang sama, dapat kita lihat ke-17 butir Indikator Kinerja Biro HKLN tahun 2024 dan rencana kerja Biro HKLN.

Melalui komparasi atas butir-butir indikator kinerja baik nomenklatur maupun besar target indikator terutama antara Renstra Setjen 2020-2024 dan Perkin Biro HKLN 2024 dan sampai pengembangan tertentu (*to some extent*) dengan Rencana Kerja Biro HKLN 2024 (bagian dari lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.), dapat kita peroleh impresi kuat bahwa telah terpenuhi harmoni atau keselarasan antara Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 yang ditunjang oleh rencana kerja Biro HKLN di tahun yang sama.

Keselarasan dalam perencanaan indikator kinerja pada hakikatnya turut menjadi prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang diusung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### a. Capaian Kinerja Biro HKLN Tahun 2024

Perencanaan, monitoring, pengumpulan, pengukuran, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan. Penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada dokumen Manual Indikator Kinerja untuk setiap Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian target setiap IK Biro HKLN periode tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar yang mengikuti adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per tanggal 15 Januari 2025 dimana berdasarkan aplikasi, Nilai Kinerja Biro HKLN tahun 2024 adalah 103,59.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi	Capaian
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	99,91	103,11%
	2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	94,36	101,14%
	3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	97,73	103,97%
	4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	96,06%	107,93%
	5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	90,93	103,33%
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
	7 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	100%	107,53%
	8 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	88,11%	100,13%
	9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%
3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	85,80	102,14%
	11 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	85,58	100,68%
	12 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%	100%
	13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	100%	106,38%
	14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	95%	100%
	15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	99,52%	104,76%
	16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	100%	100%
17 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	82,29	109,72%	

Tabel 5 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Biro HKLN tahun 2024

The screenshot shows the 'e-Kinerja' application interface. At the top, it displays the logo of the Ministry of Marine and Fisheries and the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN e-Kinerja Home'. The date 'Rabu, 15 Januari 2025' is shown in the top right corner. The main content area shows the following information:

- Periode: NKO Desember - 2024
- Unit Kerja: BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
- Skor Kinerja: 103.59

At the bottom, there are instructions in Indonesian regarding data support and updates:

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silakan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol



Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjaku Tahun 2024 untuk akun Biro HKLN

The screenshot shows the top navigation bar of the Kinerjaku application. On the left, there is the logo of the Indonesian Ministry of Marine and Fisheries Affairs (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA) and the text 'Kinerjaku Home'. On the right, the date 'Rabu, 15 Januari 2025' and a user profile icon are visible. Below the navigation bar, there is a form with two fields: 'Unit Kerja' (Work Unit) and 'Tahun' (Year). The 'Unit Kerja' field is a dropdown menu with the selected value '0104000000 - BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI'. The 'Tahun' field is a dropdown menu with the selected value '2024'.

KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

☰ Kinerjaku Home

Rabu, 15 Januari 2025

Unit Kerja

0104000000 - BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Tahun

2024

Gambar 3 *Screen capture* aplikasi kinerja untuk output kinerja Biro HKLN Tahun 2024

Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 2024 dengan 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024);
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) merupakan penjelasan apabila terdapat pemeringkatan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Penilai posisi/peringkat KKP secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja selama tahun 2024;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja baik antar unit kerja/Kementerian/Lembaga maupun instansi dan lembaga terkait;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian; dan
8. Untuk Indikator Kinerja yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di periode

berjalan dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja.

#### IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP

Pengukuran nilai dimensi Input pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP dihitung berdasarkan nilai/skor yang diperoleh Kementerian/Lembaga untuk 4 (empat) variabel, yaitu:

- a. Anggaran;
- b. Bahan informasi;
- c. Sarana dan prasarana; dan
- d. Media dan saluran komunikasi.

Variabel anggaran memiliki empat indikator, yaitu:

- a. Ketersediaan anggaran untuk program/kegiatan tahun berjalan;
- b. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan;
- c. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan; dan
- d. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang IKP lainnya.

Variabel bahan informasi terdiri dari enam indikator:

- a) Ketersediaan bahan informasi tentang Program Nasional (RKP 2022) sebelum pelaksanaan program/kegiatan;
- b) ketersediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo, sebelum pelaksanaan program/kegiatan;
- c) ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo sebelum pelaksanaan program/ kegiatan;
- d) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media;
- e) Kesediaan K/L menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika;
- f) Ketersediaan bahan informasi termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Variabel sarana dan prasarana terdiri dari dua indikator:

- 1) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi),
- 2) ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP
- 3) Variabel media dan saluran komunikasi, terdiri dari dua indikator:
  - (a) ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh K/L dan Dinas Kominfo
  - (b) ketersediaan media partner

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
96,9	99,91	103,11%	89,36	89,36	100%	96,9	-	103,11%

Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,6	89,6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Tabel 7 Target dan Realisasi IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tahun 2017 s.d. Tahun 2023

IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP adalah Indikator Kinerja baru diintroduksi di Biro HKLN pada tahun 2023 dan dilanjutkan ke tahun 2024 dengan besar targetnya tercantum dalam Tabel 1. Sumber informasi nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Republik Indonesia. Besar nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2024 dan diumumkan pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan isi Tabel 6 dan Tabel 7 di atas, Biro HKLN tak hanya berhasil memenuhi target IK tetapi juga mengalami peningkatan dari realisasi dan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, realisasi di tahun 2024 juga melampaui target untuk IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP yaitu sebesar 96,9 sehingga capaiannya menjadi 103,11%.

Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik tahun 2024 meningkat target dan hasilnya dibanding tahun 2023. Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tahun 2024 belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena belum tersedia. Hingga akhir 2024 tidak ada data resmi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan terkait Indikator Kinerja ini.

Nilai Dimensi Input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP secara resmi diumumkan oleh Kementerian Informasi dan Digital melalui Seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 di Bandung, 12 Desember 2024. Berkas audio dan video kegiatan seminar telah dipublikasi secara terbuka tanggal 12 Desember 2024 melalui akun 'Ditjen IKP Kemkomdigi' pada media sosial YouTube dan dapat diakses melalui tautan <https://www.youtube.com/live/mGIIWtJVOnI?si=dZvVvY4g3XjWEqD>.

Kegiatan Seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 dibuka oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital yakni Bapak Dr. Hasyim Gautama. Dalam kata sambutannya, Dr. Hasyim Gautama menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih score tertinggi pengisian survei Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 kategori Kementerian dan Lembaga Negara. Beliau juga menambahkan bahwa diharapkan di masa yang akan mendatang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 menjadi instrument strategis komunikasi publik yang lebih baik, lebih transparan bagi kebutuhan rakyat Indonesia. Dr. Hasyim Gautama juga menyebutkan kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih skor tertinggi untuk Nilai Dimensi Input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP sebagaimana dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	99,63	100,00	100,00	99,91	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	97,07	100,00	100,00	99,27	Sangat Baik
3	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100	94,69	100,00	100,00	98,67	Sangat Baik

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

- a. Pengelolaan layanan produksi; dan
- b. Publikasi produksi video dokumenter.

Pada Tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan sejumlah kegiatan kegiatan, diantaranya adalah:

- a. monitoring media sosial dengan 72.513 data di twitter/X, 2.315 data di instagram, 1.131 data di facebook, 177 data di tiktok, dan 2.722 data di youtube;
- b. monitoring media massa dengan 21.430 pemberitaan di media online, 1.428 pemberitaan di media cetak, dan 132 pemberitaan di media tv;
- c. 8 kali konferensi pers dengan topik Update Perkembangan Kasus Penyelundupan Benih Bening Lobster, Kinerja KKP Semester 1 Sekretariat Jenderal, Kinerja KKP Semester 1 DJPT, DJPB, PDSPKP, Kinerja KKP Semester 1 PKRL dan BPPMHKP, Kinerja pengawasan SDKP Semester 1, Update Kasus Tuding Dumping Udang di Amerika Serikat, Update Penindakan Penyelundupan Lobster, Update Penegakan Hukum Untuk Pulau Pulau Kecil dan Terluar.
- d. 3 kali Bincang Bahari dengan topik Lulusan Vokasi KKP Unggul Langsung Terjun Di Dunia Kerja Pasca Wisuda, Beecamp: Ciptakan Wirausaha Baru KP, Apa itu susu ikan;
- e. 115 siaran pers;
- f. Produksi 2 episode podcast
- g. Produksi 3 edisi KKP News
- h. Publikasi konten di media sosial KKP, meliputi:  
Instagram, 214 konten  
Tiktok, 31 konten  
Twitter, 139 konten  
Facebook, 176 konten  
Youtube: 25 buah Video, 31 Live Video, 39 buah Short Video
- i. Penyusunan 3 bahan investigasi isu, meliputi pencemaran lingkungan dari tambak budi daya di Karimunjawa, Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut di Morodemak, dan Profiling Rusdianto Samawa terkait Pemberitaan Negatif dan Narasi "Tangkap Menteri Trenggono" di media rmol.
- j. Penyusunan 6 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Modeling Budi Daya Rumput Laut, Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Satelit Cakupan Nusantara, Tahun Tuna, Asian-Pacific Aquaculture 2024, dan Update Kebijakan Pengelolaan Lobster.

Terkait dengan publikasi produksi video dokumenter, telah dilaksanakan 5 video yaitu:

- a. Distribusi Perikanan Berkereta
- b. Harapan di Bawah Laut Kapoposang
- c. Srikandi dari Seriwé
- d. Tuna Sirip Kuning dari Tanah Papua
- e. Kalamo di Timur Indonesia

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas terdapat masalah seperti:

- a. Untuk produksi podcast, terdapat kendala dalam penjadwalan waktu taping podcast dengan narasumber, sehingga terdapat sejumlah materi podcast yang belum diproduksi;
- b. Untuk produksi video dokumenter, tim cukup mengalami hambatan dari lamanya proses negosiasi tim pengadaan barang/jasa dengan vendor atau media sebagai penyedia jasa;
- c. Untuk penyusunan strategi komunikasi maupun investigasi isu, tim mengalami hambatan dalam mengumpulkan informasi awal dari Eselon 1 terkait, lamanya mendapat respon maupun menunggu konfirmasi data terkait;

Namun, karena pemimpin dan jajaran anak buah yang bergerak di bidang kehumasan di Biro HKLN adalah para profesional andal yang sudah berpengalaman dan teruji daya tahan, loyalitas dan dedikasinya maka sangat mudah untuk bagi Biro HKLN merumuskan dan menerapkan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai solusi jitu atasi masalah di atas yaitu:

- a. Untuk hambatan yang dialami saat produksi video dokumenter, Tim melakukan follow up secara berkala terkait proses negosiasi dan penyelesaian e-catalog dari tim pengadaan barang/jasa;
- b. Untuk hambatan yang dialami dalam penyusunan strategi komunikasi maupun investigasi isu, Tim melakukan follow up kepada Eselon 1 terkait, dan menambah sumber informasi seperti dari pihak eksternal (Dinas Kelautan dan Perikanan terkait); dan
- c. Melalui koordinasi dan kerja sama yang mumpuni, Strategi komunikasi dan investigasi isu berhasil dituntaskan. Bagi yang tertarik untuk membaca apa saja isinya, maka tautan berisi strategi komunikasi adalah [https://drive.google.com/drive/folders/1XmN\\_7qzLp6XCuUhUnCNbHTIz6ojXDbj9?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1XmN_7qzLp6XCuUhUnCNbHTIz6ojXDbj9?usp=share_link) dan investigasi isu yaitu [https://drive.google.com/drive/folders/1sODogBMLQtyjkiWOGSaO-IQR00YrSy8O?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1sODogBMLQtyjkiWOGSaO-IQR00YrSy8O?usp=share_link).

Pekerjaan utama yang dituntaskan dalam Tim Kerja Pemberitaan dan Opini Publik (POP) untuk memenuhi target IK ini adalah mengisi survei Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di tingkat Kementerian/ Lembaga non Kementerian di tingkat Pusat yang terdiri dari Dimensi Input. Survei dilaksanakan oleh tim Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2024.

Beberapa faktor lainnya yang diyakini menjadi penyebab keberhasilan Biro HKLN dalam memenuhi target Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan peran yang jelas bagi setiap anggota tim kerja POP

Ketua tim kerja POP dan para pegawai senior tim kerja POP berhasil membentuk anggota tim kerja POP memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan tim dan peran setiap individu dalam mencapainya. Hal ini memungkinkan setiap anggota tim kerja POP untuk fokus berkontribusi mencapai sasaran bersama. Pemahaman yang jelas tentang peran dan tujuan juga membantu menghindari tumpang tindih dan konflik sepanjang tahun 2024.

2. Komunikasi yang terbuka dan jujur di internal tim kerja POP

Bagi tim kerja POP, komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan hal yang esensial dalam menjiwai setiap tugas dan fungsi sepanjang melakukan pekerjaan rutin dan insidental. Tim kerja POP memberikan ruang untuk berbicara secara terbuka tentang ide, masalah, dan kendala yang dialami maka cenderung tim tersebut akan memiliki keberhasilan yang lebih tinggi. Bahkan apabila perlu, lakukan juga diskusi yang positif dan mendengarkan saran atau pandangan orang lain sehingga kerja sama antar anggota tim dapat terbangun dengan kuat.

3. Terbangunnya kepercayaan vertikal dan horizontal secara mutual di internal Tim Kerja POP

Tim kerja POP menyadari dengan sepenuhnya bahwa kepercayaan adalah fondasi dari kerja sama dalam tim. Oleh karena itu setiap anggota tim kerja POP selalu merasa bahwa tim kerja POP dapat mengandalkan satu sama lain untuk menjalankan tugas dan menjaga komitmen. Kepercayaan di internal tim kerja POP dibangun melalui konsistensi, integritas, dan transparansi. Akibatnya, tidak ada anggota tim kerja POP yang tidak merasa kalau time kerja POP adalah tempat yang aman dan menyenangkan untuk berkontribusi secara maksimal dan untuk berkolaborasi dengan baik.



## IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP

Pengukuran Dimensi Proses dalam Indeks PIKP dilakukan terhadap empat variabel, yaitu

- 1) pengumpulan data dan informasi;
- 2) perencanaan program/kegiatan;
- 3) pelaksanaan program/kegiatan; dan
- 4) monitoring dan evaluasi.

Variabel pengumpulan data dan informasi terdiri dari tiga indikator:

- 1) pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan dengan melibatkan instansi eksternal,
- 2) frekuensi pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, dan
- 3) frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain.

Variabel perencanaan program/kegiatan, terdiri dari enam indikator:

- a) jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non rutin situasional/tahunan,
- b) jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/nonrutin situasional/tahun,
- c) keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal kegiatan, Terms of Reference (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan,
- d) indikator lain berupa perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll),
- e) perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik (kelompok masyarakat di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur), dan
- f) faktor yang dianggap paling menghambat distribusi informasi publik yang merata di seluruh Indonesia.

Variabel pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari 10 indikator:

- a) kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional,
- b) kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo,
- c) Jumlah koordinasi unit kerja dengan Kementerian Kominfo,
- d) kegiatan penyampaian setiap kebijakan dan program pemerintah berlandaskan nilai-nilai (lintas sektoral, lintas daerah, objektif, akurat, relevan, jelas, lengkap dan mudah dimengerti, interaktif serta melibatkan partisipasi publik),
- e) kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital,
- f) jumlah kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi,
- g) jumlah kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi,
- h) kegiatan terkait keterbukaan informasi publik,
- i) kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), dan
- j) kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur.

Variabel monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga indikator:

- kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan,
- kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan (baik media konvensional maupun media baru), dan
- keberadaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” pelaksanaan program/kegiatan.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
93,3	94,36	101,13%	85,25	85,25	100%	93,3	-	101,13%

Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,25	85,25

Tabel 9 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tahun 2017 s.d. 2023

IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP memiliki sumber informasi besar penilaian yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Republik Indonesia. Besar nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Komdigi berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang Tahun 2024 dan diumumkan pada akhir tahun fiskal 2024.

Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9, Biro HKLN tak hanya berhasil memenuhi target IK tetapi juga mengalami peningkatan dari realisasi dan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, realisasi di tahun 2024 juga melampaui target untuk IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP yaitu sebesar 93,3 sehingga capaiannya menjadi 101,13%.

Nilai Dimensi proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP secara resmi diumumkan oleh Kementerian Informasi dan Digital melalui Seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 di Bandung, 12 Desember 2024. Berkas audio dan video kegiatan seminar telah dipublikasi secara terbuka tanggal 12 Desember 2024 melalui akun ‘Ditjen IKP Kemkomdigi’ pada media sosial YouTube dan dapat diakses melalui tautan <https://www.youtube.com/live/mGIWtJVOnI?si=dZvVvYE4g3XjWEqD>.

Kegiatan Seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 dibuka oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital yakni Bapak Dr. Hasyim Gautama. Dalam kata sambutannya, Dr. Hasyim Gautama menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih score tertinggi pengisian survei Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 kategori Kementerian dan Lembaga Negara. Beliau juga menambahkan bahwa diharapkan di masa yang akan mendatang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 menjadi instrument strategis komunikasi publik yang lebih baik, lebih transparan dan lebih relevan

bagi kebutuhan rakyat Indonesia. Dr. Hasyim Gautama juga menyebutkan kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih skor tertinggi untuk Nilai Dimensi Proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP sebagaimana dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

No	Kementerian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00	100,00	77,43	100,00	94,36	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	100,00	76,50	100,00	94,13	Sangat Baik
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100,00	100,00	71,41	100,00	92,85	Sangat Baik
4	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00	95,00	75,35	100,00	92,59	Sangat Baik
5	Badan Kepegawaian Negara	100,00	100,00	68,67	100,00	92,17	Sangat Baik
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	85,00	74,15	100,00	89,79	Sangat Baik
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	85,00	69,06	100,00	88,51	Sangat Baik
8	Kementerian Ketenagakerjaan	100,00	85,00	66,09	100,00	87,77	Sangat Baik
9	Kementerian Perindustrian	100,00	90,00	55,40	100,00	86,35	Sangat Baik
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	75,00	93,75	75,39	100,00	86,03	Sangat Baik
11	Komisi Pemberantasan Korupsi	91,67	90,00	60,69	100,00	85,59	Sangat Baik
12	Badan Riset dan Inovasi Nasional	75,00	90,00	74,04	100,00	84,76	Sangat Baik

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

- a. Pengelolaan layanan produksi; dan
- b. Publikasi produksi video documenter.

Sepanjang Tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan beragam kegiatan kehumasan diantaranya adalah:

- a. monitoring media sosial dengan 72.513 data di twitter/X, 2.315 data di instagram, 1.131 data di facebook, 177 data di tiktok, dan 2.722 data di youtube;
- b. monitoring media massa dengan 21.430 pemberitaan di media online, 1.428 pemberitaan di media cetak, dan 132 pemberitaan di media tv;
- c. 8 kali konferensi pers dengan topik Update Perkembangan Kasus Penyelundupan Benih Bening Lobster, Kinerja KKP Semester 1 Sekretariat Jenderal, Kinerja KKP Semester 1 DJPT, DJPB, PDSPKP, Kinerja KKP Semester 1 PKRL dan BPPMHKP, Kinerja pengawasan SDKP Semester 1, Update Kasus Tudingan Dumping Udang di Amerika Serikat, Update Penindakan Penyelundupan Lobster, Update Penegakan Hukum Untuk Pulau Pulau Kecil dan Terluar.
- d. 3 kali Bincang Bahari dengan topik Lulusan Vokasi KKP Unggul Langsung Terjun Di Dunia Kerja Pasca Wisuda, Beecamp: Ciptakan Wirausaha Baru KP, Apa itu susu ikan;
- e. 115 siaran pers;
- f. Produksi 2 episode podcast
- g. Produksi 3 edisi KKP News
- h. Publikasi konten di media sosial KKP, meliputi: Instagram 214 konten, Tiktok 31 konten, Twitter 139 konten, Facebook 176 konten, Youtube 25 buah Video dan 31 Live Video serta 39 buah Short Video
- i. Penyusunan 3 bahan investigasi isu, meliputi pencemaran lingkungan dari tambak budi daya di Karimunjawa, Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut di Morodemak, dan Profiling Rusdianto Samawa terkait berita negatif dan narasi "Tangkap Menteri Trenggono" di media rmol.

- j. Penyusunan 6 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Modeling Budi Daya Rumput Laut, Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Satelit Cakupan Nusantara, Tahun Tuna, Asian-Pacific Aquaculture 2024, dan Update Kebijakan Pengelolaan Lobster.

Terkait dengan publikasi produksi video dokumenter, telah dilaksanakan 5 video yaitu:

- a. Distribusi Perikanan Berkereta
- b. Harapan di Bawah Laut Kapoposang
- c. Srikandi dari Seriwé
- d. Tuna Sirip Kuning dari Tanah Papua
- e. Kalamo di Timur Indonesia

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas terdapat masalah seperti:

- a. Untuk produksi podcast, terdapat kendala dalam penjadwalan waktu taping podcast dengan narasumber, sehingga terdapat sejumlah materi podcast yang belum diproduksi; dan
- b. Untuk produksi video dokumenter, tim cukup mengalami hambatan dari lamanya proses negosiasi tim pengadaan barang/jasa dengan vendor atau media sebagai penyedia jasa;

Pemimpin dan jajaran yang bergerak di bidang kehumasan di Biro HKLN adalah para profesional andal, berpengalaman Panjang dan teruji daya tahan, loyalitas dan dedikasinya maka sangat mudah untuk bagi Biro HKLN merumuskan dan menerapkan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai solusi jitu atasi masalah di atas yaitu:

- a. Untuk hambatan yang dialami saat produksi video dokumenter, Tim melakukan follow up secara berkala terkait proses negosiasi dan penyelesaian e-catalog dari tim pengadaan barang/jasa;
- b. Untuk hambatan yang dialami dalam penyusunan strategi komunikasi maupun investigasi isu, Tim melakukan follow up kepada Eselon 1 terkait, dan menambah sumber informasi seperti dari pihak eksternal (Dinas Kelautan dan Perikanan terkait); dan

Besaran IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tahun 2024 naik baik hasil maupun target dibanding tahun 2023. Kendati demikian, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) karena belum tercantum dalam dokumen tersebut. Perlu ditekankan bahwa tidak diketahui telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan terkait IKU ini.

Seperti IK nomor 1, pekerjaan terpenting yang dituntaskan dalam Tim Kerja POP dalam rangka memenuhi target IK ini adalah mengisi Survei Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebaik-baiknya yang tujuannya mengukur kinerja pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di tingkat Kementerian/ Lembaga non Kementerian di tingkat Pusat yang terdiri dari Dimensi Proses. Survei dilaksanakan oleh tim Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2024.

Berdasarkan hasil pengamatan harian, beberapa hal di bawah ini dapat diyakini sebagai beberapa faktor yang turut menyebabkan Tim Kerja POP sukses memenuhi target IK.

1. **Tumbuhnya Rasa Saling Percaya**  
Saling percaya merupakan fondasi yang penting bagi Tim Kerja POP membangun tim kerja yang efektif. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya, Ketua dan pegawai senior di Tim Kerja POP melakukan beberapa cara seperti menjadi contoh yang baik dengan selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan anggota tim, menunjukkan konsistensi dan transparansi dalam tindakan dan komunikasi dan membangun rasa saling percaya dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena telah sering terbukti keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan semua anggota tim merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap hasil kerja tim.
2. **Kesamaan Visi dan Misi**  
Bagi setiap anggota Tim Kerja POP adalah penting untuk memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi tim. Maka semua anggota tim bekerja menuju tujuan yang sama Ketua Tim Kerja POP terus memastikan bahwa visi dan misi tersebut relevan dan *applicable* dalam pekerjaan harian dan melibatkan anggota tim dalam proses pembuatan visi dan misi untuk memastikan bahwa mereka merasa memiliki keterlibatan dan pemahaman yang mendalam.
3. **Komunikasi yang Baik di Tim Kerja POP**  
Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun tim kerja yang efektif. Saluran komunikasi antar anggota tim terbuka dan efektif baik melalui platform elektronik maupun manual sehingga memungkinkan setiap anggota tim untuk berpartisipasi aktif berbagi informasi, ide, dan masalah yang dihadapi. Dampak terhadap anggota tim adalah merasa didengar dan dihargai saat berkomunikasi. Demikian juga Kontribusi setiap anggota tim dapat dianggap menjadi hal penting untuk membangun tim kerja yang efektif. Apresiasi secara terbuka ketika ada anggota tim yang mencapai hasil yang baik atau memberikan ide yang berharga menjadi salah satu budaya positif yang dikembangkan dan dipelihara Tim Kerja POP.
4. **Memahami Tanggung Jawab Masing-Masing**  
Setiap anggota Tim Kerja POP memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Setiap orang tahu apa yang diharapkan darinya dan bagaimana peran mereka berkontribusi dalam mencapai tujuan. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing memungkinkan anggota tim bekerja secara efisien dan saling mendukung. Terjaganya keselarasan antara tugas dan keahlian anggota tim tidak pernah lepas dari perhatian para jajaran pimpinan. Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat setiap anggota tim membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja semua anggota.

### IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri dari:

- a. perencanaan dan
- b. pelaksanaan

Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik dan Indikator penilaian.

Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengumuman. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek dinilai, terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Pelaksanaan terdiri dari:

- sosialisasi kepada Badan Publik;
- pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;
- verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;
- presentasi oleh Badan Publik; dan
- penilaian oleh Komisi Informasi.

Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi diberikan dengan kualifikasi:

- Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
- Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
- Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
- Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
- Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Pengumuman Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
94	97,73	103,97%	91	94,51	103,86%	94	-	103,97%

Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
80	85,96	85	68,82	80	90,4	81	92,06	85	96	85	96	91	94,51

Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada tahun 2024 Biro HKLN berhasil memenuhi target IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP yaitu dengan hasil sebesar 97,73, lebih besar daripada target yang sebesar 94 sehingga besar capaian IK menjadi 103,97%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka terjadi peningkatan baik pada realisasi yaitu dari 94,51 menjadi 97,73 dan capaian dari 103,86% menjadi 103,97%. Hasil yang diperoleh tahun 2024



juga sudah melampaui target dalam rencana strategis di tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang besarnya adalah 94 sehingga capaian menjadi 101,13%.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada posisi ke-9 diantara 32 Kementerian. Yang perlu menjadi sorotan di sini adalah hasil kerja keras Biro HKLN menempatkan posisi Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas Kementerian Keuangan yang hanya menempati posisi di nomor 14. Dokumen Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut dapat dilihat dalam matriks di bawah serta dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/40yZDBX>.

<b>KEMENTERIAN</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	99,41
2.	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	99,15
3.	KEMENTERIAN HUKUM	98,56
4.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	98,47
5.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	98,16
6.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	98,05
7.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	97,89
8.	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	97,87
9.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,73
10.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	97,63
11.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	97,60
12.	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	97,48
13.	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	97,40
14.	KEMENTERIAN KEUANGAN	97,37
15.	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	97,00

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro HKLN dalam pemenuhan target IK ini di tahun 2024 secara garis besar adalah:

1. Melakukan pengembangan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga setiap Unit Pelaksana Teknis memiliki website PPID masing-masing;
2. Melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di internal KKP (kepada 156 PPID Pelaksana di seluruh Indonesia)
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan PPID Pelaksana;
2. Peningkatan kapasitas petugas layanan informasi publik KKP
3. Pengelolaan PPID secara professional; dan
4. Penyusunan arah kebijakan layanan informasi publik KKP.

Tidak ada informasi resmi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai) dalam pelaksanaan pekerjaan sepanjang tahun 2024 untuk memenuhi target IK ini. Tidak ada juga kendala berarti yang dihadapi oleh Tim Kerja Layanan Informasi (LI) selama tahun 2024 dalam menjalankan program- dan kegiatan di atas. Beberapa faktor di bawah ini menjelaskan keberhasilan Tim Kerja LI dalam memenuhi target IK adalah sebagai berikut.



1. Profesionalitas Tim Kerja LI

Tim Kerja LI merupakan terdiri dari sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam pekerjaan di dunia komunikasi dan hubungan masyarakat. Setiap orang di dalam tim kerja LI telah terpilih dengan tepat dan mampu berkompetisi secara sehat sehingga terbangun tim kerja yang efektif dengan lebih mudah dalam mengeksekusi rencana kerja dengan memanfaatkan semua sumber daya tersedia seefisien mungkin. Tim Kerja LI juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kepercayaan diri, dan kemauan yang tinggi untuk bekerja sama yang dapat memperkuat dinamika tim secara menyeluruh.

2. Pembagian/distribusi kerja yang jelas

Tujuan dan peran yang jelas pada setiap anggota dalam Tim Kerja LI membuahkan kolaborasi kerja yang efektif. Peran setiap anggota dalam mencapai tujuan telah ditentukan dan diatur dengan meminimalkan terjadinya tumpang tindih atau *overlapping* dalam pekerjaan. Setiap anggota tim memahami bagaimana peran mereka dalam tim sehingga dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan peranan masing-masing. Pimpinan di Tim Kerja LI juga berhasil memfasilitasi komunikasi yang terbuka, harmonis dan produktif di dalam tim.

3. Kolaborasi aktif di lingkungan KKP

Kolaborasi yang aktif antara Biro HKLN dan tim-tim kerja lainnya di lingkungan KKP yang menyelenggarakan layanan informasi publik, komunikasi dan kehumasan terbukti menjadi kunci untuk bisa mencapai hasil yang optimal bagi Tim Kerja LI yang notabene berperan sebagai *spearhead* pemenuhan target IK ini di lingkungan KKP. Anggota Tim Kerja LI terbukti mampu bekerja sama, berbagi pengetahuan, memelihara *network* dan memanfaatkan keahlian yang dimiliki tak hanya di internal Biro HKLN tapi dengan seluruh tim kerja tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemampuan Tim Kerja LI dalam memanfaatkan fasilitas teknologi yang tersedia untuk memfasilitasi kolaborasi seperti platform kolaboratif online yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi file, mengedit dokumen secara bersamaan, dan berkomunikasi secara real-time juga berkontribusi besar bagi kesuksesan Tim Kerja LI menanggungjawab keberhasilan pemenuhan target IK.

#### IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan III 2023. Pengukuran persentase efektifitas layanan dilakukan dengan penyebaran survei kepada stakeholder (seperti sekretariat Komisi IV DPR, pihak internal KKP dan lain sebagainya) yang telah menerima layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisisioner oleh stakeholder di sepanjang Tahun 2024 setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) seperti kegiatan kunjungan-kunjungan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
89%	96,06%	107,93%	80%	92,26%	115,33%	89%	-	107,93%

Tabel 12 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	92,26%

Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2017 s.d. 2023

Pada akhir Tahun 2024, realisasi IK ini sebesar 96,06% dan oleh karena target IK adalah 89% maka capaiannya menjadi  $(96,06\% / 89\%) \times 100\% = 109,46\%$ . Besar realisasi Indikator Kinerja ini di Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 jelas mengalami peningkatan. Adappun penurunan capaian disebabkan oleh meningkatnya besar target dari 80% menjadi 89%. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya menjadi 107,93%.

Manual IK telah menentukan efektifitas layanan hubungan lembaga yaitu dengan mengacu kepada matriks di bawah ini.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Maka berdasarkan matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang antara 88,31% sampai dengan 100%. Data dukung berisi hasil survey dan berkas berisi hasil survey yang telah diolah datanya untuk mendapatkan realisasi persentase efektifitas di atas dapat dilihat dalam tautan an <https://bit.ly/40fdpJU>.

Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum teruat besar target akhir periode menengah untuk Indikator Kinerja ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk Indikator Kinerja ini.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target Indikator Kinerja ini yang bisa ditengarai adalah:

- Pengalaman tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan selama bertahun-tahun memberikan layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dan mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi;
- Dukungan anggaran yang memadai untuk tim Hubungan Kemitraan dalam menyediakan layanan yang prima dalam bidang hubungan lembaga kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan;
- Arah dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim Hubungan Kemitraan dalam berimprovisasi dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang hubungan kelembagaan kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran Biro HKLN yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.
- Seluruh rencana aksi IK ini yaitu koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pameran di sektor KP dan melaksanakan pelayanan yang efektif pada lembaga mitra pada kegiatan yaitu pendampingan Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP), pendampingan Kunjungan Kerja Masa Reses atau Kunjungan Kerja Spesifik, pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dan unjuk rasa dapat dituntaskan.

Beberapa testimoni dari responden survey/kuisisioner yang bersifat konstruktif untuk kinerja layanan hubungan lembaga khususnya pada triwulan terakhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, semoga bisa lebih baik lagi,
- Layanan sudah baik. Informasi dari Setkom tersampaikan dengan baik. Tetap butuh koordinasi di lapangan dan Penghubung dapat dihubungi dengan cepat,
- Mohon untuk dipertahankan dalam koordinasi dan kerjasamanya,
- Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini, mohon untuk terus bisa bekerjasama semakin baik satu sama lain,
- Koordinasi yang sudah terjalin sangat baik supaya Bisa dijaga dan ditingkatkan lebih baik lagi.

Sepanjang tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IK.

## IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan diperoleh melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan setiap triwulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88	90,93	103,33%	80	88,48	110,60%	88	-	103,33%

Tabel 14 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	88,48

Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada Tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2024 sebesar 90,93 sehingga capaiannya menjadi 103,33%. Target Indikator Kinerja pada Tahun 2024 adalah 88 dan berhasil dipenuhi. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 maka terjadi kenaikan dari 88,48 menjadi 90,93. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya menjadi 103,33%.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah unsur

Diketahui jumlah bobot = 1 sedangkan jumlah unsur = 9 (jumlah unsur yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Bobot nilai tertimbang ditentukan oleh Perpustakaan tidak berbeda antar unsur atau merata sehingga bobot nilai tertimbang semua unsur =  $1/9 = 0,11$ . Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM} = \text{SKM} \times 25$$

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisisioner sepanjang Tahun 2024, dari keseluruhan responden yang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari pria dan wanita dan seluruh responden tersebut menerima layanan yang jenisnya adalah:

- Layanan keanggotaan;
- Layanan bimbingan pemustaka;
- Layanan fasilitasi ISBN (International Standard Book Number) dan ISSN (International Standard Serial Number);
- Layanan penelusuran informasi;
- Layanan sirkulasi; dan
- Layanan pemanfaatan ruangan perpustakaan/baca di tempat.

Tabulasi hasil pengolahan survey yang dilakukan Perpustakaan pada triwulan terakhir tahun 2024 dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

	Unsur								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah	51	53	56	60	54	55	55	55	59
Rata-rata	3,40	3,53	3,73	4,00	3,60	3,67	3,67	3,67	3,93
Bobot	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
Rata rata x bobot	0,38	0,39	0,41	0,44	0,40	0,41	0,41	0,41	0,44
Nilai indeks IKM	3,69								
Nilai indeks IKM x 25	92,22								
Target	88								
Capaian	104,80%								

### nilai per unsur digrafikan

Oleh karena itu, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada triwulan terakhir Tahun 2024 adalah 92,22. Realisasi IK ini di Tahun 2024 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Jumlah realisasi Triwul I s.d IV} / 4 = (91,81\% + 90,28\% + 89,39\% + 92,22\%) / 4 = 90,93\%$$

$$\text{Capaian 2024} = (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% = (90,93 / 88) \times 100\% = 103,33\%$$

Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena besar Nilai Indeks SKM x 25 adalah 90,93 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100.

Raw data hasil survey dan hasil pengolahan data yang terkumpul dari survey kepuasan pelayanan Perpustakaan KKP pada Tahun 2024 dapat dilihat dalam tautan <https://bit.ly/41WHEqq>. Pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum termuat besar target akhir periode menengah untuk Indikator Kinerja ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk Indikator Kinerja ini.

Keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK ini yang memungkinkan adalah adalah:

- Pengalaman para pejabat fungsional Pustakawan dan pegawai perpustakaan KKP yang sudah bertahun-tahun memberikan layanan perpustakaan kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dan mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi;
- Proses belajar yang tanpa henti dan kejenuhan dari tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan.
- Dukungan anggaran yang memadai untuk tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam menyediakan layanan yang prima dalam bidang perpustakaan kepada *customer* perpustakaan KKP untuk literasi bidang kelautan dan perikanan;
- Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam berimprovisasi dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para *customer* perpustakaan KKP; dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran perpustakaan KKP yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.
- Kegiatan-kegiatan di bawah ini yang termaktub dalam rencana aksi IK dapat diselesaikan dengan baik:

Melakukan kegiatan pelayanan pada 9 unsur penilaian pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu:

1. persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hingga akhir Tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN.



## IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Perjanjian internasional adalah Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sedangkan tindak lanjut atau implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	100%	105,26%	90%	100%	111,11%	95%	-	105,26%

Tabel 16 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	100%

Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru diintroduksi Biro HKLN pada tahun 2024 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Adapun besar target Indikator Kinerja ini di Tahun 2024 sebesar 95%.

Berdasarkan isi kedua tabel di atas, bisa kita ketahui kalau realisasi Indikator Kinerja ini pada Tahun 2024 adalah 100%. Sementara itu besar target yang ditetapkan untuk Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja ini adalah 95% sehingga capaian Indikator Kinerja menjadi 105,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja yang sama di Tahun 2023, maka tidak terjadi perubahan yaitu dari 100% ke 100% namun besar capaian menurun karena besar target dinaikkan dari 90% ke 95%. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya menjadi 105,26%.

Pada tahun 2024, terdapat 17 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 17 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. MoU Development of Blue Economy Through Marine Affairs and Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Tanzania);
2. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Vietnam);
3. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain (kerja sama dengan negara Spanyol);

4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme (kerja sama dengan negara Perancis);
5. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022 (kerja sama dengan negara Norwegia);
6. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD (kerja sama dengan North American Aerospace Defense Command (NORAD) dari negara Amerika Serikat dan Kanada);
7. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates (kerja sama dengan negara Persatuan Emirat Arab)
8. MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (kerja sama dengan negara Arab Saudi);
9. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA (kerja sama dengan negara Amerika Serikat);
10. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia (kerja sama dengan European Free Trade Association dari negara Islandia, Liechtenstein, Norwegia and Swiss);
11. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission (kerja sama dengan negara Uni Eropa);
12. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation (kerja sama dengan negara Rusia);
13. Letter Of Intent Between The Fish Quarantine And Inspection Agency Of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Of The Republic Of Indonesia And The National Fisheries Products Quality Management Service Of The Ministry Of Oceans And Fisheries Of The Republic Of Korea On The Development Of Sanitary And Phyto-Sanitary Electronic Certification (Sps E-Certification) System For Fish And Fishery Products (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
14. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok);
15. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok)
16. Implementing Arrangement for The Establishment of a Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and The Ministry of Oceans and Fisheries of The Republic of Korea (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
17. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in respect of The Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (kerja sama dengan negara Malaysia);

Dalam perjalanannya, terjadi perubahan jumlah dokumen kerja sama dimana semula berjumlah 17 berubah menjadi 16 karena tanggung jawab tindak lanjut dokumen nomor 13 yaitu '*Letter Of Intent Between the Fish Quarantine And Inspection Agency Of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Of The Republic Of Indonesia And The National Fisheries Products Quality Management Service Of The Ministry Of Oceans And Fisheries Of The Republic Of Korea On The Development Of Sanitary And Phyto-Sanitary Electronic Certification (SPS E-Certification)*' tidak lagi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena secara otomatis beralih menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia yang terbentuk di akhir tahun 2023.

Hingga akhir tahun 2024, seluruh 16 dokumen kerja sama di atas telah mendapat tindak lanjut oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri secara langsung dan koordinatif. Bentuk kegiatan tindak lanjut kerja sama di atas adalah:

1. Rapat pembahasan tindak lanjut MoU on Development of Blue Economy through Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Tanzania, 6 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 1);
2. Partisipasi KKP pada kegiatan "Meet Indonesia" yang digagas oleh KBRI Hanoi, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 2);
3. Kunjungan kerja dalam rangka implementasi MRA ke Spanyol, 28 Januari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 3);
4. Bilateral Meeting Dialogue ke 2 di Paris, Perancis, 14 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 4);
5. Penguatan Kerja Sama Menuju BPPMHKP Yang Bersinergi dan Kolaboratif Dalam Era Modern Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, 2 Oktober 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 5);
6. Pembahasan Kuesioner Survei Neraca Aset Moneter, arus ke ekonomi dan arus ke lingkungan dalam kerangka Ocean for Development Program, 19 Juni 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 6);
7. Rapat Pembahasan Implementasi Plan of Action for the Implementation MoU on Marine and Fisheries Cooperation antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, 22 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 7);
8. Rapat pembahasan usulan amandemen MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (tindak lanjut kerja sama nomor 8);
9. Courtesy Meeting Menteri Kelautan dan Perikanan dan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Administrator, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 9);
10. Rapat Rencana Training Program on International Fish Trade, Global Applicable Framework and Market Access, 4 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 10);
11. Rapat Persiapan Pertemuan Intersesi Working Group Trade and Sustainable Development (WG TSD) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) Isu Keanekaragaman Hayati, 7 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 11);
12. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Indonesia-Rusia Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Co-Chairs Meeting dan Russia Halal Expo 2024, 26 April 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 12);
13. Pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Menteri Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok, 29 November 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 14);
14. Rapat Persiapan Pembahasan TCG Permintaan Tanggapan Tentang Peraturan/Perundang-Undangan Di Indonesia, 10 Agustus 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 15);

15. Pembahasan Indikator Monitoring dan Rencana Monitoring Sosial Ekonomi Rig to Reef, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 16); dan
16. Rapat Persiapan Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak Menangkap Ikan di Perairan Negara Lain Tanpa Izin di Provinsi Sumatera Utara, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 17)

Oleh karena itu, berdasarkan formula berikut:

$$\%KS \text{ Bilateral} = (\text{Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah dokumen KS yang aktif}) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang merupakan hasil tindak lanjut dokumen kerja sama bilateral yang aktif.
- Jumlah dokumen kerja sama yang aktif adalah dokumen kerja sama bilateral yang masih berlaku dan direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2024.

maka realisasi indikator kinerja ini adalah:

$$\text{realisasi \% KS Bilateral} = (16 / 16) \times 100\% = 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada triwulan IV 2024 adalah 95% maka capaian menjadi:

$$(\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% = (100\% / 95\%) \times 100\% = 105,26\%$$

Dokumen yang berisi informasi yang lebih lengkap seperti daftar dan jadwal kegiatan tindak lanjut kerja sama bilateral sepanjang triwulan IV 2024 atau sepanjang tahun 2024 dan tautan data dukung dokumen tindak lanjut dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/3y5WPkk> pada sheet 'IK Bilateral'.

Realisasi IK ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 maka telah melampaui target dengan capaian 105,26%. Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan. Pencapaian target IK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena sangat dipercaya kalau sepanjang Tahun 2024 tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan Tim Kerja Sama Bilateral memenuhi target IK ini adalah:

- Kegiatan kerja sama bilateral Amerika dan Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika Timur Tengah seluruhnya sesuai dengan jadwal indikatif penyelenggaraan melalui pertemuan yang dilakukan baik secara virtual dan beberapa melalui tatap muka. Beberapa kegiatan yang lebih lambat implementasinya dari bulan indikatif berhasil dilaksanakan di triwulan IV 2024;
- Rencana kegiatan kerja sama luar negeri pada tahun 2024 yang diimplementasikan sesuai jadwal, diantaranya dilakukan dengan cara virtual, terutama didorong oleh fakta bahwa keikutsertaan KKP selama ini melalui Biro HKLN dalam implementasi kerja sama luar negeri bidang kelautan dan perikanan dan peran serta posisi Biro HKLN sebagai unit kerja KKP pembina hubungan internasional di lingkup KKP selalu penting dan diperhitungkan dan menjadi mediator yang berpengalaman di KKP;

- Posisi dan keberadaan KKP yang mewakili Republik Indonesia dalam percaturan internasional sektor kelautan dan perikanan di forum bilateral selalu dipandang strategis dan sangat diperhitungkan. Hal ini tercermin dari partisipasi delegasi RI dalam kegiatan kerja sama luar negeri seperti pertemuan bidang kelautan dan perikanan atau pendampingan dan supervisi Biro HKLN dalam kegiatan kerangka kerja sama Amerika Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika Tlimur Tengah. Sumbangsih pemikiran dari para pejabat dan pegawai Biro HKLN di forum internasional yang diikuti oleh KKP kerap diakui kreatif, inovatif dan memberikan solusi. Hal ini setidaknya nampak dari penyambutan, penanggapan dan penerimaan yang positif dari negara mitra, dan oleh organisasi-organisasi kerja sama regional dan multilateral, dibuktikan melalui penerimaan dokumen kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia yang diajukan delegasi Biro HKLN.
- Semua kegiatan dalam rencana aksi untuk IK ini yaitu Pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi dokumen kesepakatan kerja sama bilateral (rapat koordinasi, keterlibatan KKP dalam pelatihan dengan negara mitra) dapat terlaksana dengan baik.

## IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh Biro HKLN diperoleh dari survei kepuasan pelayanan kepada pengguna yang telah menerima layanan pengurusan administrasi izin PDLN yang mencakup pengajuan izin PDLN ke Kementerian Sekretariat Negara, pengajuan pembuatan paspor dinas dan rekomendasi visa (bagi PDLN yang memerlukan visa) ke Kementerian Luar Negeri. Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Responden pengisi kuesioner adalah pelaku PDLN dan narahubung PDLN di unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan.

Adapun daftar pertanyaan yang disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88%	88,11%	100,13%	85%	87,45%	102,88%	88%	-	100,13%

Tabel 18 Persentase Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	87,45%

Tabel 19 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada tahun 2024, telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP. Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah angka atau besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya menjadi 100,13%.

Hasil pengolahan atas persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar 88,11%. Hasil ini diperoleh dari sejumlah responden yang mengisi dan melakukan *submit* kuisioner secara *online*. Oleh karena target Indikator Kinerja ini di Tahun 2024 sebesar 88% maka capaian Indikator Kinerja ini sebesar:

$$\text{Capaian} = (\text{realisasi} / \text{Target}) \times 100\% = (88,11\% / 88\%) \times 100\% = 100,13\%$$

Kuisioner juga menghimpun umpan balik dari para responden dalam bentuk masukan guna perbaikan dan apresiasi layanan perjalanan dinas luar negeri oleh Biro HKLN. Beberapa respon dari responden diantaranya:

- pelayanan sudah cukup baik
- Mohon dapat ditingkatkan lagi kualitas pelayanan untuk masing-masing PIC
- lebih ditingkatkan kembali layanan yang diberikan, terutama untuk pimpinan di KKP agar beliau2 merasa bahagia dengan hasil kinerja kita masing-masing...terima kasih kami ucapkan karena telah membantu proses layanan PDLN selama ini...terus semangat dan jangan kasih kendor layanan untuk pimpinan kita...Hatur Nuhun.
- mohon dapat diberikan transparansi progres prosesnya
- SOP sebaiknya lebih di Internalisasi
- terus semangat berinovasi
- Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PDLN lingkup KKP diharapkan kepada BHKLN untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai berupa sharing session/sosialisasi/pelatihan dengan tema yang relevan dan dapat mendukung pengelolaan PDLN
- layanan izin lintas KL perlu diperhatikan
- Segala hal yang baik pelayanan yang telah diberikan di tahun 2024 diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan lebih baik di tahun 2025
- semoga kedepannya makin cepat.
- Pertahankan kinerja yang sudah sangat baik
- Sudah sangat baik, arahan petugas sangat membantu dan mempermudah proses. Saran mungkin SOP diperjelas dengan diberi waktu penyelesaian setiap tahap.
- Pertahankan layanan prima bagus.
- Perlunya sosialisasi terkait unit layanan PDLN di lingkup KKP
- Membuat platform digital terpadu untuk pengajuan, persetujuan, dan pemantauan PDLN secara real-time. Selain itu perlu fitur untuk melacak status pengajuan PDLN. Ada fitur untuk mempermudah pengunggahan dokumen yang diperlukan seperti surat undangan, itinerary, dan paspor dalam format elektronik.
- Buatlah pamflet terkait meksnime dan persyaratan sebagai bahan informasi kepada pegawai KKP, agar mendapatkan informasi, pemahaman dan mudah dalam melaksanakan PDLN
- Sudah baik, semoga tetap baik dan lancar pelayanannya
- Tingkatkan sosialisasi
- Sudah berjalan baik sesuai prosedur



- Sistem pelayanan sudah sangat baik, saya sarankan adanya inovasi yang dapat membuat seluruh informasi dalam satu wadah sehingga dapat lebih mudah diakses, selain itu adanya teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan informasi dan pelayanan misalnya sebagai virtual asistant untuk menyediakan informasi terkait produk layanan
- Perlu dibuat mekanisme pemantauan online progres dan status pengurusan PDLN
- Sudah cukup baik
- semoga lebih baik
- Lebih dipercepat pelayanan
- Lebih dipercepat pelayanan
- Terus tingkatkan layanan
- Mungkin perlu disediakan aplikasi atau link khusus untuk melakukan monitoring progress pengurusan perjalanan luar negeri

Apabila mengacu kepada tabel di bawah ini yang diambil dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka dengan realisasi sebesar 88,11%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP pada Tahun 2024 adalah baik atau berkinerja baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Data mentah dan hasil pengolahan terhadap survey kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP dapat dilihat dalam tautan <https://bit.ly/4hk7gix>. Berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IK ini. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi admin PDLN pada Tahun 2024 sehingga secara langsung maupun tak langsung berkontribusi kepada keberhasilan pemenuhan target Indikator Kinerja adalah:

1. Telah dilakukan pemberian layanan seprima mungkin (berpatokan kepada peraturan yang berlaku) pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Telah dilaksanakan pemberian layanan pengurusan paspor dinas sebaik mungkin;
3. Telah diwejantarkannya layanan pengurusan visa sesempurna dan selekas mungkin tanpa menabrak dan menyalahgunakan peraturan yang berlaku; dan
4. Kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi untuk IK ini yaitu pemberian layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas di lingkungan KKP dapat dituntaskan.

**IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional**

Sebelum menghadiri pertemuan internasional, Delegasi RI wajib menyusun Pedoman Delegasi RI (Delri) agar tercipta keseragaman posisi Delri dan koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri yang didelegasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pedoman Delri tersebut memuat posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia terhadap isu yang dibahas di forum internasional dan Delri memperjuangkan posisi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam laporan forum internasional tersebut.

Pengaruh dan peran Indonesia dalam suatu forum internasional dapat dilihat dari persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima dalam forum internasional tersebut. Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Delri dapat menyuarakan kepentingan nasional di level internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dijabarkan salah satunya dalam bentuk program prioritas Kementerian.

- Posisi adalah kedudukan/pandangan/kepentingan RI dalam pembahasan suatu agenda/isu di forum internasional.
- Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam forum internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.
- Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral.
- Diterima adalah dicatatnya/dicantumkannya/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan internasional.

Laporan dan dokumen sidang dapat berbentuk Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, laporan Delri, agreements, MOU's, summary record/ of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, atau work plan/program.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
93%	100%	107,53%	92%	100%	108,7%	93%	-	107,53%

Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
												92%	100%

Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang

baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Besar target Indikator Kinerja ini di Tahun 2024 adalah 93% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya menjadi 107,53%. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya menjadi 107,53%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 untuk IK ini, besar realisasi sama-sama 100% dan persen capaian mengalami sedikit penurunan karena besar targetnya meningkat.

Realisasi kegiatan kerja sama luar negeri ruang lingkup regional dan multilateral oleh Biro HKLN sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### Kerja sama Regional (KSR)

1. Pertemuan ASWGF ke-32
2. Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-16
3. Pertemuan ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ke-31 (30th ASEAN JCM),
4. SEAFDEC SCM ke-56
5. SEAFDEC PCM ke-47
6. FCG/ASSP ke-27
7. BIMP-EAGA (WG on Fisheries) ke-11
8. The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission
9. The 31st Annual Meeting of CCSBT
10. Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17
11. The 21st Regular Session of the WCPFC
12. Penyusunan ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers
13. RPOA IUU CCM

Berdasarkan, hasil yang dihimpun dari profesional/pejabat fungsional pengampu kegiatan/pekerjaan KSR dalam tim kerja Kerja Sama Multilateral Biro HKLN, hingga akhir Desember 2024, seluruh kegiatan forum internasional yang berjumlah 13 buah berhasil dihadiri oleh delegasi dari Biro HKLN/Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan dokumen posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan, yaitu:

1. Dokumen SEAFDEC SCM ke-56 (KSR), 6 Mei 2024, tautan: [https://drive.google.com/drive/folders/1QbD4FDlgCLKp3IOCeK1r-Hhy8FNDge7e](https://drive.google.com/drive/folders/1QbD4FDlgCLKp3IOCeK1r-Hhy8FNDge7e;);
2. Dokumen the 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission (KSR), 13 Mei 2024, tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1V-5GwnufQrxgkvz6NdvEXjMVPtnSaN5W>;
3. Pertemuan ASWGF ke-32 di Kuala Lumpur, Malaysia" dimana disampaikan dokumen deliverable Indonesia: Common Understanding and Initiative on small scale aquaculture dan Regional Strategy to encourage the implementation of FAO FG on small scale fisheries dan kertas posisi (KSR), triwulan III 2024, tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1-Syk0yfWdZkDbv7wb50rqf6E1Iz3yr7R> ;
4. Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ke-16 di Kuala Lumpur, Malaysia (dilaksanakan sebelum ASWGF pada triwulan III 2024) dimana dalam forum turut

- disampaikan Kertas Posisi RI (KSR), tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1yYNGHR1u3CwxIV-B3VghcogRdKNB4C9a> ;
5. Pertemuan ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ke-31 (30th ASEAN JCM) pada triwulan III 2024. Forum tahunan ASEAN ini secara spesifik membahas mengenai komoditas-komoditas utama perdagangan ASEAN dalam working group seperti seaweed dan tuna. KKP menjadi lead country untuk ASEAN Tuna Working Group (KSR), tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1aGYQy2vC3K-SsGNwbqMwSwoD-MCMjPJS> ;
  6. Dokumen untuk kegiatan forum Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17, diselenggarakan pada triwulan ke-3 tahun 2024 (KSR), tautan: [https://drive.google.com/file/d/1-w748GBZR4KldIQiQe17dwZSSWyP7yHe/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1-w748GBZR4KldIQiQe17dwZSSWyP7yHe/view?usp=drive_link);
  7. Dokumen Penyusunan dan pengesahan ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers, terselenggara pada triwulan III tahun 2024 (KSR), tautan: <https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/ASEAN-Guidelines-on-the-Placement-and-Protection-of-Migrant-Fishers.pdf>;
  8. The 31st Annual Meeting of Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna, 7 Oktober 2024 (KSR), tautan: [https://drive.google.com/drive/folders/1CL8WbhLzkDCQzKLKAoya3Nw4LA1YdC\\_u](https://drive.google.com/drive/folders/1CL8WbhLzkDCQzKLKAoya3Nw4LA1YdC_u) ;
  9. The 21st Regular Session of the Commission WCPFC (WCPFC21), tanggal 27 November 2024 (KSR), tautan: <https://docs.google.com/document/d/1hHz7QZ7qd5-pDXraic6FT2sf47Xl3uo3/edit?usp=sharing&oid=109396997933145975321&rtpof=true&sd=true>;
  10. Pelaksanaan the 17th RPOA-IUU Coordination Committee Meeting, 26 November 2024 (KSR), tautan: [https://drive.google.com/file/d/1rl57s3EOQDRufJM6aTh3jiKu09UJw2zw/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1rl57s3EOQDRufJM6aTh3jiKu09UJw2zw/view?usp=share_link).
  11. SEAFDEC Program Committee Meeting ke-47 (KSR), 2 Desember 2024 tautan: [https://drive.google.com/file/d/1YQHWppGimguh8Hqtf4\\_LTxNGzJL8jIY/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YQHWppGimguh8Hqtf4_LTxNGzJL8jIY/view?usp=sharing) ;
  12. Kegiatan 27th Fisheries Consultative Group ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (KSR), 2 Desember 2024, tautan: [https://drive.google.com/file/d/1YQHWppGimguh8Hqtf4\\_LTxNGzJL8jIY/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1YQHWppGimguh8Hqtf4_LTxNGzJL8jIY/view?usp=sharing) ;
  13. Pertemuan The 11th BIMP-EAGA Agribusiness Meeting (KSR), 2 Desember 2024 tautan: [https://docs.google.com/document/d/1fvdVg8Jj3Ggv\\_hTlgTnlG80AecXYmC4plb220t3HwdU/edit?tab=t.0](https://docs.google.com/document/d/1fvdVg8Jj3Ggv_hTlgTnlG80AecXYmC4plb220t3HwdU/edit?tab=t.0);

#### Kerjasama Intrakawasan (KSI)

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22
3. Pedoman Delri/Kerpos SGOM ATSEA-2
4. Proyek APEC OFWG 101 2024A - Promoting Decision Support System (DSS) in the APEC Region
5. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum IORA WGBE (batal)
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024
7. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9
8. RSC 6 ATSEA-2

9. Pedoman Delri/Kerpos MM ATSEA-2
10. Pedoman Delri/Kerpos Pre-SOM/SOM ke-19
11. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen IORA guideline IUUF
12. Pedoman Delri/Kerpos Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan

Berdasarkan, informasi dari dari profesional/pejabat fungsional pengampu kegiatan/pekerjaan KSI dalam tim kerja Kerja Sama Multilateral Biro HKLN, terdapat 1 kegiatan yang dibatalkan di tahun 2024 yaitu Forum IORA WGBE oleh karena lembaga IORA menanggung sampai ke tahun 2025. Oleh karena itu hanya 11 forum internasional saja untuk dihadiri oleh delegasi dari Biro HKLN/Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2024 dan pada forum terhormat tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Adapun ke-11 dokumen posisi/rekomendasi/Prakarsa delegasi Indonesia untuk kegiatan internasional tersebut adalah:

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada forum OOC-9 (KSI), 12 Januari 2024, tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXujl7cL>;
2. Bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024 (KSI), 29 Januari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/13ezVJEUVEpCqSttMcnPjLaF473YH3l8f/view> ;
3. Posisi/Presentasi dalam rangka forum pertemuan APEC OFWG ke-22 (KSI), 22 Februari 2024 tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXujl7cL>;
4. Pedoman Delegasi RI untuk Konferensi Tingkat Menteri ke-13 World Trade Organization (KSI), 24 Februari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/15GEgPJc6Hvs1XlZyH23GJE9-MaTHhoPD/view?usp=sharing>;
5. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada forum internasional OOC-9 (KSI), 7 Maret 2024, tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXujl7cL> ;
6. Posisi/Presentasi dalam rangka forum pertemuan APEC OFWG ke-23 yang selanjutnya diubah menjadi -> Diterimanya Usulan Proyek KKP oleh APEC dimana Proyek yang diusulkan KKP di APEC Project Session I Tahun 2024 telah dinyatakan diterima dan dapat dibiayai oleh APEC (KSI), April 2024, tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXujl7cL> ;
7. Bahan/dokumen untuk partisipasi pada forum IORA guideline IUUF (KSI), 2 Mei 2024, tautan: [https://drive.google.com/file/d/1rebTtfyznRtnZJN0OpE7oyOSBD1Tn\\_Ei/view](https://drive.google.com/file/d/1rebTtfyznRtnZJN0OpE7oyOSBD1Tn_Ei/view);
8. Panduan Delegasi RI untuk menghadiri forum the Pre-Senior Officials Meeting dan 19th Senior Officials Meeting (KSI), 2 Desember 2024 tautan: [https://drive.google.com/file/d/16dgn2dmP\\_tmgRSs8cc7NA25EW1zNm7BD/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/16dgn2dmP_tmgRSs8cc7NA25EW1zNm7BD/view?usp=sharing);
9. Pedoman Delri/Kerpos yang disampaikan pada forum SGOM ATSEA-2 (KSI), 10 Desember 2024, tautan: <https://bit.ly/3ZXM4uz>;
10. Dokumen untuk keikutsertaan pada forum RSC 6 ATSEA-2 (KSI), 10 Desember 2024, tautan: <https://bit.ly/3ZXM4uz>;
11. Pedoman Delri/Kerpos untuk keterlibatan di dalam forum MM ATSEA-2 (KSI), 10 Desember 2024, tautan: <https://bit.ly/3ZXM4uz>;

#### Kerja Sama PBB (KSPBB)

1. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management

2. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD- 11) di Bangkok, Thailand
4. Sidkom 80
5. Regional Ocean Dialogue
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 36th FAO COFI
7. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum COP 29 UNFCCC
8. CITES 33rd Animals Committee Meeting
9. SOM AIS (batal)
10. Dokumen Proposal Project GEF 8 disampaikan kepada GEF

Berdasarkan informasi dan hasil kegiatan yang dihimpun dari para profesional/pejabat fungsional pengampu kegiatan/pekerjaan KSPBB dalam tim kerja Kerja Sama Multilateral Biro HKLN, di tahun 2024 terjadi pembatalan untuk kegiatan nomor 9 yaitu SOM AIS. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, jumlah forum internasional yang berhasil diikuti oleh delegasi dari Biro HKLN/KKP dimana pada seluruh kesempatan tersebut disampaikan dokumen posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan adalah 9 (sembilan) buah. Adapun dokumen yang disampaikan dalam forum-forum elit di atas adalah:

1. Bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management (KSPBB), 15 Januari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/1uta3Wn78THT-O3BqQ60LoXjBeqVj62Ue/view?usp=sharing> ;
2. Bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters (KSPBB), 8 Januari 2024, tautan: [https://drive.google.com/file/d/1ZGxy5R5PMULaTyBgZIM0cQvZj90aUm\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1ZGxy5R5PMULaTyBgZIM0cQvZj90aUm_/view?usp=sharing) ;
3. Bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD-11) di Bangkok, Thailand (KSPBB), 20 Februari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/1Da0CDdgYuTTUEHTx2obmT-vD-ARMVIRY/view?usp=sharing> ;
4. Pedoman Delri untuk Sidkom 80 (KSPBB), 22 April 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/1Xor3iifSlqEaFZE2vydiKfwjoMBr1BF0/view?usp=sharing> ;
5. Tim Kerja Sama Multilateral Biro HKLN berhasil menyusun dokumen untuk keikutsertaan dalam Regional Ocean Dialogue pada Sidang Komisi UN ESCAP ke-79 tahun 2023. Dalam forum berkelas tersebut, Biro HKLN sukses mendorong diadopsinya Resolusi 79/2 tentang Kerja Sama Regional untuk Mempercepat Aksi Perubahan Iklim terkait Laut di Asia dan Pasifik untuk Pembangunan Berkelanjutan. Biro HKLN Indonesia bersama co-sponsors Fiji dan Maladewa menyelenggarakan Regional Dialogue on Ocean-based Climate Action (OBICA) di Kantor Pusat UN ESCAP, Bangkok (KSPBB), tanggal 19 September 2024 tautan: <https://drive.google.com/file/d/1QWm6wkUGaOlrdVIIWoIYJhtaL8fEmqXU/view?usp=sharing> .
6. Bahan/dokumen pedoman delegasi RI untuk Forum 36th Session of the FAO Committee on Fisheries, 8 Juli 2024. Tautan: [https://drive.google.com/file/d/1KYUV5\\_N6ruP0KciHe5hZpdPJk12sesvM/view?usp=sharelink](https://drive.google.com/file/d/1KYUV5_N6ruP0KciHe5hZpdPJk12sesvM/view?usp=sharelink) ;
7. Bahan/dokumen posisi Indonesia untuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Thirty-third meeting of the Animals Committee Geneva, 12



- Juli 2024. Tautan dokumen:  
<https://drive.google.com/drive/folders/19xcCF5dr0B1fdLJLlArWOSS2IBV7wER>;
8. Baham/dokumen *Proposal Project* untuk didanai oleh GEF 8, tautan:  
[https://drive.google.com/file/d/1shzxspSVWQbHhoWNvuu4SKclyRrwr3ga/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1shzxspSVWQbHhoWNvuu4SKclyRrwr3ga/view?usp=share_link);
  9. Bahan/dokumen pada Forum United Nations Climate Change Conference - Twenty-ninth session of Conference of the Parties (COP29), 11 November 2024. Tautan:  
[https://drive.google.com/file/d/1AZON7LadudLCE0laZwtFkt3M6BqQQ1my/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1AZON7LadudLCE0laZwtFkt3M6BqQQ1my/view?usp=share_link);

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari pimpinan dan staf tim kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir tahun 2024, terdapat 13 + 11 + 9 = 33 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang perikanan.

Data dukung serta informasi lain terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Tahun 2024 dapat diakses melalui tautan <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WggoPZeHGVRr3Jhwx4TI4lLaqLRBNeH9edlyfyw7J0w/edit?gid=993020150#gid=993020150> pada *sheet* 'IK PosisiRekomendasi'.

Pencapaian target IK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN. Diyakini sekali tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.



## IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Kepemimpinan pada Forum Regional/Multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia (Pemri) untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, atau sebagai anggota Organisasi Internasional (OI) dengan menduduki suatu jabatan strategis pada OI tersebut.

Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kegiatan dan melaksanakan program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi Focal Point OI tersebut, dalam hal ini adalah KKP. Forum Regional/Multilateral adalah organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral. OI adalah institusi yang beranggotakan 3 negara berdaulat atau lebih.

Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa Komite dan Working Group, antara lain dapat menjadi Presidensi dan Ketua Organ Subsider. Indonesia juga dapat ditunjuk sebagai Host atau Co-Host, sebagai member of Bureau, Member of Council, Member of Board, Coordinator of (Group). Keberhasilan pencalonan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	92%	100%	108,7%	100%	-	100%

Tabel 22 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92%	100%

Tabel 23 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN sejak triwulan III 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Tidak ada ditetapkan besar target untuk IK untuk tahun-tahun sebelum atau periode triwulan sebelum triwulan III tahun 2023.

Forum regional dan multilateral yang menjadi dasar pemenuhan target Indikator Kinerja ini berjumlah 3 (tiga) yaitu:

1. Pada tanggal 14-15 Mei 2024 bertempat di Pulau Bali, Indonesia, telah diselenggarakan ASEAN-Australia Indo-Pacific Workshop on the Use of Technology for Sustainable Aquaculture.

Kegiatan ini berawal dari inisiasi Kementerian Luar Negeri sebagai implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo Pacific, dengan dukungan Pemerintah Australia. CN telah disahkan di AMAF. Tentu saja dalam kesempatan ini Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkesempatan mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum workshop internasional yang bergengsi ini.

Agenda kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, dengan agenda hari pertama difokuskan untuk *full class activity*, sedangkan hari kedua adalah praktik lapangan dalam bentuk *field trip* ke lokasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau lokasi lain yang terkait dengan perikanan (terkait dengan isu Digitalisasi Teknologi Perikanan) dilengkapi dengan aktivitas *lunch* dan *cultural performance* serta *excursion*.

Target peserta kegiatan ini adalah pemangku kepentingan di sektor perikanan budidaya di ASEAN. Kementerian Luar Negeri mengidentifikasi bahwa diperkirakan ada kegiatan KKP yang mengundang peserta dari negara ASEAN yang dapat disinergikan dengan workshop ASEAN-Australia. Peserta dari negara-negara Forum Pasifik diberikan pembiayaan dari Australia, sedangkan peserta ASEAN dengan pembiayaan masing-masing. Kegiatan dibiayai sebagian besar oleh Pemerintah Australia dengan *co-sharing* dari pemerintah Republik Indonesia (Kemlu dan KKP) yang diharapkan mendukung untuk pembiayaan seperti paket meeting, field trip, jamuan makan, rapat persiapan, souvenir, transportasi lokal, dan perjalanan tim pelaksana dari Biro HKLN.

2. Pelaksanaan the 3rd IORA workshop on Principle Guidelines on IUU Fishing di Bali, 1-3 Oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemri (Kemlu dan KKP), bekerja sama dengan Sekretariat IORA dan Pemerintah Prancis. Pertemuan diikuti wakil 17 negara IORA, yaitu Australia, Comoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Singapore, Sri Lanka, Seychelles, Thailand, Oman, Maldives, France, Madagascar, South Africa, Yemen, Tanzania, dan IORA Secretariat.

Lokakarya ketiga di Bali bertujuan untuk memantapkan dan memfinalkan konsep IORA Principle Guidelines on IUU fishing yang sudah dibahas pada lokakarya pertama dan kedua oleh semua negara anggota IORA, dan diharapkan hasil pada lokakarya ketiga berupa final draft Principle Guidelines on IUU fishing sdiadopsi pada Council of Ministers (COM) IORA ke-24 yang akan dilaksanakan pada bulan November di Sri Lanka. Hasil (outcome) dokumen pada tautan 07102024-Final Draft of IORA Principle Guidelines on Combating IUU Fishing-2.docx

3. Setelah melalui waktu selama 5 tahun, proyek 'Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2)' diakhiri melalui serangkaian pertemuan strategis yang diselenggarakan di Pulau Bali tanggal 10 sampai 11 Desember 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa agenda utama pada kegiatan tersebut adalah rapat pamungkas Regional Steering Committee (RSC), rapat perdana Regional Coordination Committee (RCC), dan pertemuan pertama Regional Stakeholder Working Group (RSWG). Agenda-agenda utama tersebut turut menjadui penanda transisi dari kolaborasi yang hanya berdasarkan proyek menjadui kolaborasi jangka panjang ATSEA regional.

Agenda-agenda di atas merupakan kelanjutan dari Arafura and Timor Seas Ministerial Forum di Sydney. Pada forum tersebut, menteri dari Indonesia yakni Sakti Wahyu Trenggono, dari Australia yaitu Tanya Plibersek dan dari Papua Nugini yaitu H.E Jelta Wong bertemu di Sydney, Australia dan Bersama menandatangani dokumen Sydney Ministerial Declaration. Dokumen tersebut menekankan Kembali komitmen kolaborasi lintas batas dan pembangunan ekonomi

biru yang berkelanjutan. Penandatanganan dokumen Sydney Ministerial Declaration juga merupakan peluncuran resmi mekanisme ATSEA Regional Governance, adopsi Strategic Action Programme (SAP) 2024-2033 dan the Financial Strategies and Plan.

Dr. I Nyoman Radiarta yang adalah Kepala Badan PPR Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat berterima kasih atas semua pencapaian yang sudah didapatkan. Hal ini jelas tertangkap dari pidatonya yaitu *“This forum ensures that new governance mechanisms address transboundary challenges effectively while promoting sustainable development in the Arafura and Timor Seas.”* Becermin dari kesuksesan program sebelumnya, Manajer Natural Resource Management Program dari UNDP Indonesia, Tuan Iwan Kurniawan menambahkan pernyataan *“The transition to a long-term Regional Governance Mechanism (RGM) is crucial for sustaining these collaborative efforts beyond ATSEA-2.”*

Dengan demikian, pada Tahun 2024, Biro HKLN sukses memenuhi target Indikator Kinerja yang sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Tahun 2023 untuk pelaksanaan IK ini, tidak terjadi perubahan pada besar realisasi namun terjadi penurunan pada besar capaian karena besar target yang meningkat. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya menjadi 100%.

*Raw data* atau data dukung serta informasi terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Tahun 2024 dapat diakses melalui tautan tautan <https://bit.ly/3DBDcTP> dan <https://bit.ly/3ZWEErI> pada *sheet* ‘IK Ketuanrumahan’. Tidak bisa dilakukan komparasi dengan target jangka menengah untuk Indikator Kinerja ini karena tidak tersedia besaran pembandingnya. Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan analisis melalui pembandingan. Pencapaian target IKK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena itu diyakini tidak terjadi inefisiensi pada sumber daya-sumber daya tersebut. Kegiatan pada rencana aksi IK ini yaitu melakukan pengusulan pencalonan perwakilan Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional juga dapat dilaksanakan.

## IK 10 Persentase penyelesaian temuan BPK di Lingkup Biro HKLN

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK dan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Masih berdasarkan Peraturan yang sama, pejabat yang merupakan satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dimana tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang diwajibkan oleh *competent authority*.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Frekuensi perhitungan pada IKU ini dilakukan secara tahunan dengan capaian yang akan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Keuangan atau Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%

Tabel 24 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan hasil yang diterima oleh Biro HKLN yang sumber asalnya eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi IK ini ditahun 2024 adalah 100%.

Target IK ini tahun 2024 adalah 100% sehingga capaian tahun 2024 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% \\
 &= (100\% / 100\%) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Target jangka menengah adalah 100% oleh karena itu capaian IKU ini apabila didasarkan pada target akhir jangka menengah 2020-2024 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui atau memenuhi target sehingga capaiannya 100%.

Beberapa hal yang sudah dilakukan Biro HKLN sepanjang tahun 2024 dalam mendukung pencapaian target IK seperti:

1. Menindaklanjuti temuan tahun sebelumnya (apabila terdapat);
2. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
3. Melakukan inventarisasi;
4. Mereviu laporan keuangan;
5. Menyelesaikan catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi;
6. Perbaiki pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara;
7. Perbaiki penyajian laporan keuangan dan meminimalkan penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
8. Mengikuti pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis, dan
9. Koordinasi dengan Biro Keuangan.

Besar temuan untuk Biro HKLN di tahun 2024 adalah 0 (nol). Perbandingan realisasi Biro HKLN di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

No.	Eselon II	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (<0,05)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	108.154.067.925	0	≤0,5	0,00	101,00
2.	Biro Keuangan dan BMN	12.640.204.252	0	≤0,5	0,00	101,00
3.	Biro Hukum	12.880.657.575	0	≤0,5	0,00	101,00
4.	Biro Umum dan PBJ	278.023.036.098	531.517.736	≤0,5	0,19	62,76
5.	Biro SDMAO	14.366.545.908	0	≤0,5	0,00	101,00
6.	Biro HKLN	24.068.292.534	0	≤0,5	0,00	101,00
7.	Pusdatin	114.742.240.281	23.440.000	≤0,5	0,02	96,91
8.	LPMUKP	37.458.248.739	0	≤0,5	0,00	101,00
9.	BPISDKP	21.672.569.009	0	≤0,5	0,00	101,00
10.	Satker Dekonsentrasi	7.788.068.712	0	≤0,5	0,00	101,00
<b>SETJEN</b>		<b>631.793.931.033</b>	<b>554.957.736</b>	<b>≤0,5</b>	<b>0,09</b>	<b>83,43</b>

## IK 11 Nilai PM SAKIP Biro HKLN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
84	85,80	102,14%	80,50	83,30	103,48%	84%	-	102,14%

Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50	83,30

Tabel 27 Target dan Realisasi IK Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja telah tersedia di akhir Tahun 2024 yaitu sebesar 85,80. Besar targetnya adalah 84 sehingga capaian IK menjadi 102,14%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan besar realisasi IK ini meskipun terjadi penurunan besar capaian dari 103,48% menjadi 102,14%. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena besar target meningkat dari tahun 2023 sebesar 80,50 menjadi 84 di tahun 2024 sehingga secara matematis terdapat peningkatan besar bilangan pembilang. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui atau memenuhi target sehingga capaiannya 102,14%.

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan berpedoman kepada Permen PAN RB 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi mencakup :

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.



Penilaian Mandiri level II Lingkup Setjen telah dilakukan pada medio Tahun 2024 bersama dengan Inspektorat I dengan melakukan verifikasi terhadap 4 komponen penilaian evaluasi SAKIP dengan menggunakan aplikasi kinerjaku yang memiliki bobot masing-masing komponen. Hasil verifikasi di Tahun 2024 dan sebelumnya terangkum dalam matriks komponen dan bobot penilaian sebagaimana tersaji di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,00	21,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>83,30</b>	<b>85,80</b>
	<b>Predikat Penilaian</b>		<b>A (Memuaskan)</b>	<b>A (Memuaskan)</b>

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1247/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 memberikan arahan untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepannya yaitu berupa hasil evaluasi sehingga dapat diberikan perhatian seperti pada:

a. Aspek Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan).
- 2) Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya.
- 3) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai karena kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 4) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

b. Aspek Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- 2) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria pengukuran kinerja yaitu telah disusun dashboard strategi komunikasi KKP

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat waktu.
- 2) Substansi Laporan Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2024 telah sesuai standar



- 3) Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN. Seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal seperti perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

d. Evaluasi Internal

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlu untuk disampaikan bahwa kegiatan dalam rencana aksi untuk IK ini yaitu pemenuhan seluruh aspek penilaian pada LKE dapat dituntaskan dengan baik di tahun 2024.

## IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
85	85,58	100,68%	79	84,45	106,90%	85	n.a.	100,68%

Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	71	69,74	72	54,95	73	77,53	78	79,29	79	84,45

Tabel 29 Target dan Realisasi IK Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023

Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Organisasi Pemerintah nomor : Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025 menunjukkan bahwa perolehan Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2024 adalah 85,58. Jika dibandingkan dengan realisasi IK ini di tahun 2023 yang sebesar 84,45 maka terjadi peningkatan pemerolehan.

Target IKU ini di tahun 2024 adalah 85, oleh karena realisasi melampaui target maka capaiannya menjadi 100,68%. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal yang adalah 76, realisasi Biro HKLN tahun mampu melampaui target jangka menengah sehingga besar capaian menjadi 112,61%. Jika dibandingkan dengan hasil IK yang sama di tahun 2023 maka terjadi peningkatan besar realisasi meskipun capaiannya mengalami sedikit penurunan yang disebabkan meningkatnya besar target dari tahun 2023 sebesar 79 menjadi 85 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya 100,68%.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal, peringkat Biro HKLN adalah di posisi ke-8 untuk perolehan realisasi IK ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 Biro HKLN naik *ranking*. Detailnya perolehan IK ini di lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	12,5	30	5	72,5
2	Biro Perencanaan	21,84	33,5	26,63	5	86,97
3	Biro Keuangan	21,1	35,96	26,54	5	88,59
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,9	37,39	26,47	5	89,76
5	Biro Hukum	21,74	34,47	28,97	5	90,18
6	Biro HKLN	21,43	32,01	27,14	5	85,58
7	Biro Umum dan PBJ	20,72	36,92	25,19	5	87,83
8	Pusdatin	21,17	35,63	28,33	5	90,13
9	BPISKP	22,75	39,17	25	5	91,92
	<b>Total</b>	<b>21,85</b>	<b>33,06</b>	<b>27,14</b>	<b>5</b>	<b>87,05 (Tinggi)</b>

Biro HKLN berhasil memenuhi target IK karena memperhatikan arahan Biro SDMAOP seperti:

- Melakukan pemutakhiran data Pendidikan terakhir untuk meningkatkan aspek kualifikasi;
- Mengusulkan pejabat yang belum mengikuti diklat fungsional khususnya yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu;
- Mengusulkan penyelenggaraan pelatihan secara virtual melalui aplikasi e-learning;
- Mengusulkan tugas dan izin belajar ke Badan RSDMKP;
- Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai; dan
- Penerapan hukuman disiplin bagi pegawai (jika ada).

Upaya yang dilakukan Biro HKLN untuk memenuhi target IK dititikberatkan pada:

- penyampaian imbauan melalui grup aplikasi whatsapp agar setiap PNS Biro HKLN melakukan update data pelatihan (seperti seminar, webinar dan kegiatan sejenis lainnya);
- pemutakhiran data pendidikan terakhir dan pelatihan;
- memberikan asistensi atau pendampingan kepada PNS Biro HKLN mengenai tutorial melakukan update di akunnya masing-masing; dan
- Berbagi informasi di media sosial Biro HKLN tentang brosur atau poster rencana penyelenggaraan webinar, seminar dan lain sebagainya khususnya yang tanpa dikenakan biaya sehingga bisa diikuti ASN Biro HKLN dalam rangka menambah wawasan dan kapasitas.

Pada akhirnya, perlu juga untuk menjadi perhatian para pembaca laporan kinerja bahwa sepanjang tahun 2024 sangat diyakini tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini.

**IK 13 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro HKLN**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
94%	100%	106,38%	92%	133%	120%	94%	-	106,38%

Tabel 30 Realisasi dan Capaian IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro HKLN Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
65%	35%	66%	98,89%	80%	100%	82%	100%	84%	100%	88%	100%	92%	133%

Tabel 31 Target dan Realisasi IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023

Target, realisasi dan capaian atas IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Tahun 2024 dan progress kinerja IK ini jika dibandingkan dengan perolehan kinerja di tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dapat dilihat pada kedua tabel di atas. Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal yang notabene merupakan penanggung jawab penghitungan IK ini di KKP, untuk Tahun 2024 ditetapkan targetnya sebesar 94%. Hasil penghitungan yang diumumkan Pusat Data, Statistik dan Informasi menunjukkan bahwa Biro HKLN berhasil meraih realisasi sebesar 100%.

Dengan realisasi tersebut maka capaian dihitung oleh aplikasi kinerjaku menjadi 106,38%. Hal ini berarti bahwa kinerja Biro HKLN melampaui target Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya 100,68%.

Adapun faktor utama keberhasilan Biro HKLN memenuhi target Indikator Kinerja ini adalah diperkirakan tingkat intelegensia pegawai Biro HKLN di atas rerata dari kebanyakan orang Indonesia apalagi pegawai Biro HKLN sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam memenuhi target Indikator Kinerja ini setidaknya sejak tahun 2017. Faktor minor yang juga masih berkontribusi dalam pemenuhan target IK ini adalah kegiatan pemantauan terhadap unggahan pegawai Biro HKLN ke portal.kkp.go.id setiap triwulan.

IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional yang dapat diacu sebagai pembanding atau sebagai target untuk jangka waktu tertentu, seperti menengah atau panjang. Perolehan realisasi dan capaian Biro HKLN untuk nilai IK ini pada Tahun 2024 di lingkup Sekretariat Jenderal memosisikan Biro HKLN sebagai

salah satu unit kerja dengan performa yang tidak dapat dikatakan membanggakan karena besar realisasinya lebih rendah beberapa Biro lainnya bahkan di bawah perolehan LPMUKP. Posisi Biro HKLN di lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

No.	Eselon II	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1.	Biro Perencanaan	94,00	133,33	141,84
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	94,00	133,33	141,84
3.	Biro Hukum	94,00	133,33	141,84
4.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	94,00	100,00	106,38
5.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	94,00	100,00	106,38
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	94,00	133,33	141,84
7.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	94,00	133,33	141,84
8.	LPMUKP	94,00	133,33	141,84
<b>Sekretariat Jenderal</b>		<b>94,00</b>	<b>125,00</b>	<b>132,98</b>

Kondisi ini hendaknya mendapat perhatian yang lebih serius dan memotivasi Biro HKLN untuk meningkatkan etos kerja di tahun anggaran berikutnya sehingga memperoleh nilai maksimal untuk IK ini sehingga peringkatnya kembali kepada yang terbaik atau masuk ke kelompok terbaik. Tidak diketahui adanya berita resmi terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini sepanjang Tahun 2024.

**IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. akhir Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh mitra kerja di Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	100%	105,26%	75%	75%	100%	95%	-	105,26%

Tabel 32 Realisasi dan Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	80%	69%	60%	100%	65%	65%	70%	83,33%	75%	75%

Tabel 33 Target dan Realisasi IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada Tahun 2024 adalah 100%. Target di Tahun 2024 untuk indikator kinerja ini adalah 95% maka capaian IK ini di Tahun 2024 menjadi 105,26% karena realisasi melampaui target. Pada periode Tahun 2023 realisasi indikator kinerja yang sama adalah 75% dengan target sebesar 75% sehingga besar capaiannya hanya 100%. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 juga melampaui target sehingga capaiannya 105,26%.

Realisasi indikator kinerja ini adalah berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 kepada Kepala Biro HKLN. Dalam Memorandum tersebut disampaikan terdapat 18 rekomendasi untuk Biro HKLN pada Tahun 2024 dan 18 rekomendasi tersebut telah tuntas ditindak lanjut sehingga persentase rekomendasi sebesar 100%, dan hal tersebutlah yang menjadi faktor utama keberhasilan Biro HKLN guna mencapai besar target Indikator Kinerja di Tahun 2024. Nilai kinerja organisasi Biro HKLN yang mencapai angka di atas 100 pada Tahun 2024 semakin meyakinkan kita kalau secara kuantitatif realisasi Indikator Kinerja ini berpengaruh positif terhadap kinerja Biro HKLN secara keseluruhan selama Tahun 2024.

Faktor-faktor lain khususnya di internal Biro HKLN yang dapat dipercaya menjadi penyebab keberhasilan pemenuhan target IKU ini selama 2024 adalah sebagai berikut:

- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN senantiasa memperhatikan dan sigap menindaklanjuti apabila ada notifikasi resmi butir-butir rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendreal yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;

- Tim satker Biro HKLN yang memiliki budaya kerja cepat, cermat dan tepat mampu memberi dukungan penuh kepada setiap arahan dari jajaran pimpinan Biro HKLN serta sangat menyadari bahwa setiap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral pasti berguna dalam perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Ketersediaan sumber daya Biro HKLN khususnya sumber daya manusia yang menjadi penanggung jawab langsung untuk pelaksanaan IKU ini selain memadai juga efektif dan efisien yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim Kerja dan 2 (dua) orang professional karena memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat dengan ditunjang pengalaman kerja bertahun-tahun.
- Kegiatan dalam rencana aksi yaitu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan bisa dilakukan dengan lengkap di tahun 2024.

Perbandingan realisasi IKU Biro HKLN dibandingkan unit kerja lain lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat dalam matriks di atas dimana seluruh unit kerja mampu memenuhi target IKU tahun 2024.

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	36	36	-	-	100%	0
3.	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4.	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5.	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6.	Biro HKLN	18	18	-	-	100%	0
7.	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8.	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9.	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
<b>SETJEN</b>		<b>196</b>	<b>196</b>	<b>120.551.753</b>	<b>120.551.753</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi dan evaluasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN untuk IK ini. Tidak termonitor adanya indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang Tahun 2024.



## IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Persentase penyerapan anggaran Biro HKLN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro HKLN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro HKLN

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	99,52%	104,76%	95%	99,55%	104,79%	95%	-	104,76%

Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	99,69 %	-	99,48 %	-	99,15 %	-	98,90 %	-	99,62 %	95 %	98,68 %	95%	99,55 %

Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas maka diketahui bahwa realisasi IK di tahun 2024 adalah 99,52% sangat sedikit turun dari tahun 2023 yang sebesar 99,55% . Oleh karena target IK ini di tahun 2024 adalah 95% maka capaian IK adalah 104,76%. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 melampaui target sehingga capaiannya 104,76%.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode Tahun 2024 karena pada kenyataannya tidak ada berita laporan atau berita resminya.

Sejauh ini belum tersedia data realisasi dan standar untuk IKU ini baik di tingkat kementerian, nasional dan internasional sehingga tidak bisa dilakukan komparasi. Hal penting yang patut disorot adalah tidak pernah diterima laporan resmi yang menyebutkan bahwa sudah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia atau sumber daya Biro HKLN lainnya pada semua kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK ini sepanjang tahun 2023.

Beberapa hal yang disampaikan di bawah ini diperkirakan menjadi penyebab keberhasilan Biro HKLN memenuhi target IKU ini di tahun 2024:

- Percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sudah dilakukan sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien, dan akuntabel, jika diperlukan dan diberi arahan pimpinan;
- Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan pelelangan secara elektronik dan mendapat arahan pimpinan;
- Optimalisasi pencapaian IKU termasuk dengan menggunakan metode daring atau virtual untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan memerlukan tatap muka,
- Optimalisasi atas sisa anggaran yang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan prioritas dikerjakan berdasarkan arahan pimpinan;

- Para pegawai Biro HKLN yang bertugas mengelola anggaran melakukan pemantauan progres penyelesaian sesuai dengan jadwal; dan
- Pegawai Biro HKLN yang berkompeten tidak dilarang untuk melakukan pemantuan posisi kas keuangan Biro HKLN dengan disiplin dan berkala dengan frekuensi lebih rapat seperti harian serta berdasarkan arahan pimpinan.

Dibandingkan dengan realisasi yang dihasilkan oleh Biro dan Pusat lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal, posisi Biro HKLN lumayan.

UNIT ESELON II	PAGU EFEKTIF	REALISASI TERHADAP PAGU EFEKTIF		
		REALISASI	SISA DANA	%
Biro Perencanaan	266,864,573,000	252,862,971,730	14,001,601,270	94.75%
Biro Keuangan dan BMN	12,637,831,000	12,581,275,160	56,555,840	99.55%
Biro SDM Aparatur dan Organisasi	14,468,690,000	14,308,927,072	159,762,928	98.90%
Biro Hukum	12,448,837,000	12,413,394,401	35,442,599	99.72%
Biro Humas dan KLN	28,016,964,000	27,882,348,446	134,615,554	99.52%
Biro Umum dan PBJ	326,809,193,000	325,922,532,400	886,660,600	99.73%
Pusdatin	108,164,748,000	107,611,105,172	553,642,828	99.49%
<b>TOTAL</b>	<b>769,410,836,000</b>	<b>753,582,554,381</b>	<b>15,828,281,619</b>	<b>97.94%</b>

**IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri**

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Di tahun 2024, yang diajukan Biro HKLN adalah Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n.a.	100%

Tabel 36 Realisasi dan Capaian IK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2017 s.d. 2023

Besar realisasi dan capaian IK di Tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah sama 100%. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 memenuhi target sehingga capaiannya menjadi 100%.

Sampai akhir tahun 2024 tidak tersedia informasi mengenai data dari Unit Kerja/Kementerian atau standard Nasional/Internasional yang dapat digunakan sebagai pembanding Biro HKLN dalam realisasi IKU Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tiadanya berita resmi terkait maka dapat disimpulkan bahwa nihil adanya indikasi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung maupun tidak langsung sepanjang Tahun 2024.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan dalam rencana aksi untuk IK ini yaitu Penyelesaian rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP terlaksana dengan baik;
- b. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil dirampungkan menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditetapkan di Jakarta pada 25 September 2024;

- c. Materi substansi yang diatur di dalam rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dibahas sampai tuntas bersama unit kerja eselon 1 lingkup KKP sehingga memperoleh pendalaman materi secara matang khususnya dalam diskusi pembahasan batang tubuh rancangan Keputusan Menteri sehingga dapat diperoleh konsep regulasi yang komprehensif dan implementatif serta waktu yang diperlukan untuk menggodok rancangan Keputusan Menteri tersebut berada dalam rentang jadwal yang sudah direncanakan;
- d. Kegiatan pimpinan dan pegawai yang menangani rancangan Keputusan Menteri yang merupakan pegawai yang berada dalam Tim Kerja Layanan Informasi dimana kegiatan layanan informasi sangat padat serta kerap bersifat insidental. Kendati demikian, para pejabat dan pegawai Tim Kerja Layanan Informasi sangat berdedikasi sehingga senantiasa menyempatkan diri untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan dengan di tengah jadwal yang sangat tidak longgar;
- e. Pihak eksternal Biro HKLN yang memiliki posisi penting dalam proses pembahasan Rancangan Keputusan Menteri seperti dari Biro Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, terlepas dari keterbatasan waktu yang mereka punya untuk melakukan pembahasan dalam rangka koreksi dan pemberian masukan terhadap Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tetap mampu melakukannya dengan prima dalam mengonstruksi rancangan keputusan yang baik; dan
- f. Perkembangan dinamika terhadap layanan data dan informasi publik sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi sehingga diperlukan ketelitian dan selalu *update* dalam menguasai perkembangan dan kemajuannya. Kemampuan atau kompetensi mumpuni dari pegawai tim kerja Layanan Informasi dibuktikan dengan keberhasilan menyusun rancangan Peraturan Menteri yang isinya antisipatif terhadap dinamika dan perubahan dalam dunia pekerjaan pelayanan data dan informasi sehingga konsekuensinya peraturan menteri yang dihasilkan bersifat awet dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang relatif panjang.

Beberapa bentuk kinerja yang ditunjukkan tim kerja Layanan Informasi Biro HKLN di tahun 2024 dalam pemenuhan target IKK ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat dengan Biro Hukum dan Organisasi, unit kerja Eselon 2 lingkup Setjen dan unit-unit kerja kehumasan eselon 1 lingkup KKP secara *offline* dan *online* guna penyempurnaan rancangan Keputusan Menteri;
- b. Studi literatur, konsultasi dengan ahli/pakar tentang pelayanan prima penyediaan data dan informasi oleh instansi pemerintah;
- c. Studi komparasi atas referensi legislasi dan peraturan yang serupa di kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- d. Tim kerja Layanan Informasi Biro HKLN selalu memantau dan berpartisipasi membahas substansi dan hal-hal pendukung dalam rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Biro Hukum dan unit-unit kerja lainnya di lingkup KKP dan pihak eksternal; dan
- e. Tim kerja Layanan Informasi Biro HKLN mempelajari dan memahami dengan cermat bahan akademik untuk menyempurnakan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan..

**IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN**

Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis, serta dianggap telah melaksanakan program-program RB secara baik. Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar penilaian terhadap manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian atas Unit Kerja Menuju WBK dilakukan oleh Itjen melalui LKE dengan indikator penilaian sebagai berikut:

1. Proses dengan Bobot 60%, terdiri atas:
  - Manajemen Perubahan (bobot 5%);
  - Penataan Tata Laksana (bobot 5%);
  - Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%)
  - Penguatan Akuntabilitas (bobot 10%)
  - Penguatan Pengawasan (bobot 15%); dan
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%).
2. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%).
3. Kualitas Pelayanan Publik (bobot 20%).

Layanan yang dinilai dalam kegiatan WBK di tahun 2024 adalah Pelayanan Informasi dan Data.

Tahun 2024			Tahun 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
75	82,29	109,72%	75	81,34	108,45%	75	-	109,72%

Tabel 38 Realisasi dan Capaian IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN Tahun 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	81,34

Tabel 39 Target dan Realisasi IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam kedua tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2024 Biro HKLN memperoleh realisasi untuk IK ini sebesar 82,29. Oleh karena target IK sebesar 75 maka capaiannya menjadi 109,72%. Realisasi dan capaian di tahun 2024 merupakan kelanjutan pelaksanaan IK yang sama di Tahun 2023. Tidak ada standar nasional untuk IK ini yang bisa dirujuk sebagai pembanding. Jika dibandingkan dengan isi Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 untuk target IK ini di Tahun 2024 maka realisasi Tahun 2024 memenuhi target sehingga capaiannya menjadi 109,72%.

Secara umum, yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai Biro HKLN supaya bisa memenuhi target IK ini adalah:

1. Berkomunikasi intensif dengan para pakar WBK dari Inspektorat Jenderal agar mendapatkan tips, kiat, wejangan dan petunjuk dalam menjalani pemenuhan IK ini yang membutuhkan waktu lebih dari setahun karena adanya kesinambungan dengan tahun 2023;
2. Melakukan rapat-rapat internal dan bersama pihak eksternal yaitu dengan Inspektorat Jenderal terkait dengan WBK; dan
3. Menyediakan seluruh dokumen yang diminta para pakar WBK dari Inspektorat Jenderal selengkap dan sesempurna mungkin.

Tidak ada laporan resmi bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia selama tahun 2024 untuk memenuhi target Indikator Kinerja ini.



Gambar 4 Piagam Penghargaan untuk Biro HKLN atas keberhasilan memenuhi target IK Nilai Minimal yang dipersyaratkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Di lingkungan KKP yang memperoleh penilaian WBK di tahun 2024, peringkat Biro HKLN tidak berada di posisi terakhir meskipun bukan di peringkat tertinggi. Informasi lengkap tentang posisi Biro HKLN dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

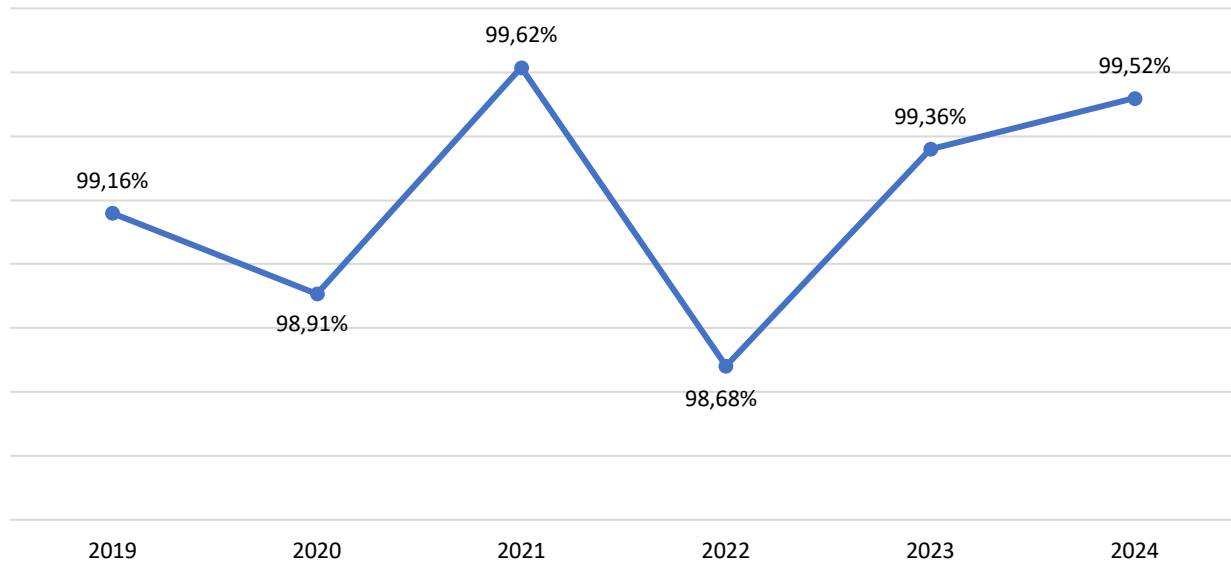
<b>No</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
1	Balai Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BPKIL) Serang	88.03	Lulus
2	Biro Perencanaan	85.86	Lulus
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA)	84.98	Lulus
4	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang	84.17	Lulus
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	83.78	Lulus
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	83.05	Lulus
7	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	82.56	Lulus
8	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN)	82.29	Lulus
9	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana	81.95	Lulus
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	82.56	Lulus
11	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	80.47	Lulus
12	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	80.46	Lulus
13	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (SDMAO)	79.51	Lulus
14	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus	76.56	Tidak Lulus*



**b. Kinerja Anggaran Biro HKLN Tahun 2024**

Realisasi anggaran Biro HKLN per 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp 27.882.348.446 dari pagu efektif sebesar Rp 28.016.964.000 atau persentase sebesar 99,52%. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada akhir tahun 2023 maka di akhir tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 99,36% menjadi 99,52%.

**Persentase Realisasi Anggaran Biro HKLN Tahun 2019-2024**



Adapun realisasi anggaran per Rincian Output (RO) dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini.

Kode	Rincian Output	Pagu	Realisasi	% Realisasi
2322.PEC.001	Kerja Sama Internasional	6,013,146,000	5,979,114,012	99.43%
2328.EBA.958	Hubungan Masyarakat dan Informasi	3,673,362,000	3,605,437,411	98.15%
2328.EBA.962	Layanan Umum	10,394,070,000	10,370,424,198	99.77%
2328.EBA.994	Layanan Perkantoran	4,186,550,000	4,068,157,205	97.17%
2328.EBB.951	Belanja Modal Lainnya (Video Dokumenter)	3,749,836,000	3,749,816,620	100.00%
<b>Jumlah</b>		<b>28,016,964,000</b>	<b>27,882,348,446</b>	<b>99.52%</b>

**Nilai Efisiensi Anggaran**

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- Data capaian NKO BHKLN pada aplikasi Kinerja; dan
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran BHKLN.

Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi	Anggaran	Realisasi	%	% NPSP x Anggaran	% Efisiensi Anggaran
------------	--------------------------	----------	-----------	---	-------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6 = 2x3	7 = 6-4
Biro HKLN	103.59	28,016,964,000	27,882,348,446	99.52%	2,902,277,300,760	2,874,394,952,314
					<b>% Efisiensi = 7/3</b>	<b>102.59</b>

c. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai umpan balik Perencanaan 2025

Berikut ini adalah butir-butir evaluasi atas realisasi dan persentase capaian butir-butir IK Biro HKLN sepanjang tahun 2024:

- a. Target IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional di Triwulan I sampai III tahun 2025 di angka supaya diubah menjadi masing-masing 10%, 15% dan 20% karena kebanyakan kegiatan yang terkait IK ini berada di periode triwulan IV tahun 2025;
- b. Jika target IK ditingkatkan sebagian atau seluruhnya di tahun 2025 atas instruksi Sekretaris Jenderal atau pejabat dari Inspektorat Jenderal atau pejabat dari Biro Perencanaan, pegawai Biro HKLN hendaknya meningkatkan semangat bekerja dan berkinerja;
- c. Meskipun mungkin tidak terlihat nyata oleh pimpinan dan rekan kerja, kebiasaan kerja dan kinerja yang tidak produktif seperti malas dan ceroboh tidak boleh dilanjutkan; dan
- d. Juga meskipun tidak bisa dilihat oleh oleh pimpinan dan rekan kerja, mental bekerja dan berkinerja keras, cerdas, cermat dan bersahaja yang dimiliki pegawai Biro HKLN harus diteruskan di tahun-tahun berikutnya.

d. Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP tahun 2024

Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh pihak terkait adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil).

Adapun rekomendasi SAKIP Biro HKLN tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN nomor Nomor : B.1247/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berupa catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti serta dapat diakses hasilnya melalui tautan [https://bit.ly/BHKLN\\_TLEvSAKIP2023](https://bit.ly/BHKLN_TLEvSAKIP2023). Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut terangkum dalam Tabel 40 di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Perlu dilakukan internalisasi terkait Informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami ukuran dan capaian kinerja unit kerja organisasi.	Pemberitahuan kepada pegawai Biro HKLN tautan publikasi Laporan Kinerja Biro HKLN 2023 di awal tahun 2024 supaya para pegawai tertarik membacanya.	Sudah ditindak lanjut	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sY5V7uPnODRfhMFFPlueCDQMaOsWOGga?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1sY5V7uPnODRfhMFFPlueCDQMaOsWOGga?usp=sharing</a>
2.	Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan pengukuran kinerja secara berkala.	Substansi pidato Kepala Biro HKLN pada apel pagi mencakup rencana peningkatan keterlibatan Kepala Biro HKLN dalam kegiatan pengukuran kinerja	Sudah ditindak lanjut	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h-MJnXZ_5DDI0Py7Z8qegkN57pOSWSc8">https://drive.google.com/drive/folders/1h-MJnXZ_5DDI0Py7Z8qegkN57pOSWSc8</a>
3.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait 1 indikator kinerja yang belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Telah dibangun komunikasi dengan pejabat dari Biro Perencanaan KKP sehingga akan dilakukan tindak lanjut diantaranya dengan diskusi internal Biro Perencanaan atas indikator kinerja Biro HKLN belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Sudah ditindak lanjut	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17PYr8Qcx6rM090eCEfvVYmdo5nQ0AdQz">https://drive.google.com/drive/folders/17PYr8Qcx6rM090eCEfvVYmdo5nQ0AdQz</a>

Tabel 40 Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP tahun 2024

## BAB IV KINERJA LAINNYA

Penghargaan yang telah diraih Biro HKLN di tahun 2024 adalah:

1. Stand terbaik pada pameran perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024;



2. Badan Publik dengan kualifikasi 'INFORMATIF' dari Komisi Informasi Pusat Tahun 2024; dan



3. Penghargaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Terbaik 1 kategori Penerbitan Media Internal (*Inhouse Magazine*) Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, 2024.



## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN Tahun 2024 berjumlah 17, dan seluruh Indikator Kinerja yang telah selesai penghitungan realisasinya pada Tahun 2024. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut (dilengkapi kode IKU berdasarkan aplikasi kinerjaku):
  - a. IKS.01, Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP, realisasinya adalah 99,91, targetnya adalah 96,9 maka capaiannya sebesar 103,11%;
  - b. IKS.02, Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP, realisasinya adalah 94,36, targetnya adalah 93,3 maka capaiannya sebesar 101,14%;
  - c. IKS.03, Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP, realisasinya adalah 97,73 targetnya adalah 94 maka capaiannya sebesar 103,97%;
  - d. IKS.04, Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 96,06%. Target IK ini adalah 89% maka capaiannya menjadi 107,93%;
  - e. IKS.05, Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi IKU sebesar 90,93% dengan besar target yaitu 88%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 103,33%;
  - f. IKS.06, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 95%, realisasi 100% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerjaku menjadi 105,26%;
  - g. IKS.07, Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 88,11% sehingga capaiannya adalah 100,13%;
  - h. IKS.08, Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 93%, realisasi 100%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku adalah 107,53%;
  - i. IKS.09, Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan. Besar target yaitu 100% dan realisasinya 100%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 100%;
  - j. IKS.10, Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target IK ini adalah 100% sementara realisasi IK mencapai angka 100% sehingga capaiannya adalah 100%;
  - k. IKS.11, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target IK ini adalah 84 dan realisasi IK adalah 85,80% sehingga capaiannya adalah 102,14%;
  - l. IKS.12, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target Indikator Kinerja ini adalah 85, realisasinya sebesar 85,58 maka capaiannya menjadi 100,68%;
  - m. IKS.13, Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, realisasinya sebesar 100%. Dengan target IKU sebesar 94% maka aplikasi kinerjaku menghitung capaian untuk IK ini sebesar 106,38%;
  - n. IKS.14, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target yang



ditetapkan untuk IK ini adalah 95%, hasil akhir realisasinya sebesar 95% maka capaian IK adalah 100%;

- o. IKS.15, Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target IK ini adalah 95% dan realisasinya sebesar 99,52% maka capaian IK menjadi sebesar 104,76%;
- p. IKS.16, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100 %. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 100% sehingga capaiannya menjadi 100%; dan
- q. IKS.17, Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi, targetnya adalah 75 dan hasil realisasinya adalah 82,29 maka capaiannya menjadi 109,72%.

2. Pemenuhan target Indikator Kinerja Biro HKLN di Tahun 2024 diyakini telah melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP yang dialokasikan untuk Biro HKLN dengan seefektif dan seefisien mungkin.

#### Aspek Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Berkas rencana aksi Biro HKLN Tahun 2024 dimana di dalamnya terdapat evaluasi rencana aksi dapat dilihat dalam tautan <https://bit.ly/4aLbG2A>;
- Pada Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2023 tidak ada rekomendasi untuk dilakukan melalui kegiatan atau tindakan konkret di tahun 2024;
- Atas arahan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal maka Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2023 dimanfaatkan untuk mengubah target di Tahun 2024 Matriks perubahan target Indikator Kinerja dari tahun 2023 ke Tahun 2024 dapat dilihat dalam matriks di bawah ini;
- Di jaman masih diterapkannya DUPAK untuk mendapat angka kredit jabatan fungsional, setiap pembahasan realisasi dan persen pencapaian indikator kinerja dalam laporan kinerja nyata memiliki manfaat untuk dijadikan data dukung dalam rangka menambah kredit bagi para pegawai fungsional tertentu.
- Kemungkinan, perubahan budaya kinerja yang Biro HKLN akibat adanya laporan kinerja Biro HKLN adalah para pegawai Biro HKLN setiap hari menjadi lebih bergairah untuk selalu menjadi lebih pintar dan bukan sebaliknya.



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2023	Target 2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	89,36	96,9
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	85,25	93,3
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	91	94
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	80%	89%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	80%	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	90%	95%
		7	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	85%	88%
		8	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	92%	93%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	92%	100%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	100%	100%
		11	Nilai PM SAKIP Biro HKLN	80,5	84
		12	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	79	85
		13	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN	92%	94%
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	75%	95%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	95%
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	100%
		17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN	75	75

## Saran

*Above all*, nilai kinerja Biro HKLN pada Tahun 2024 adalah sebesar 103,59 yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat predikat baik. Maka, menurut hemat kami, tidak perlu dirumuskan saran untuk periode mendatang karena sama saja menjadikan predikat tersebut *meaningless*.

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 ditanda tangan tanggal 15 Januari 2024



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Prabowo  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan  
Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo

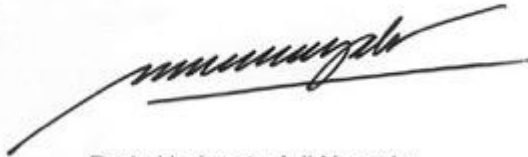
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	96,9
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	93,3
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	94
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (persen)	89
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (persen)	95
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (persen)	93
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP (persen)	88
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (persen)	100
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	84
		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	85
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		13	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	95
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (persen)	100
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	29.986.550.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024		37.486.550.000

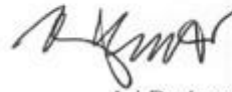
Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri



Ari Prabowo





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Prabowo  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya Sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2024

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan  
Kerja Sama Luar Negeri

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Ari Prabowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

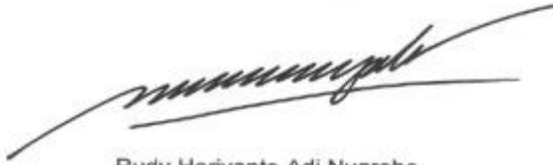
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik	1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	96,9
	2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	93,3
	3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	94
	4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	89
	5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	88
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
	7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
	8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
	9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
	11 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	84
	12 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	85
	13 Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro HKLN (%)	94
	14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	95
	15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	95
	16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100
	17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Biro HKLN (nilai)	75

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	29.028.911.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024		36.528.911.000

Jakarta, 23 Oktober 2024

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri



Aji Prabowo